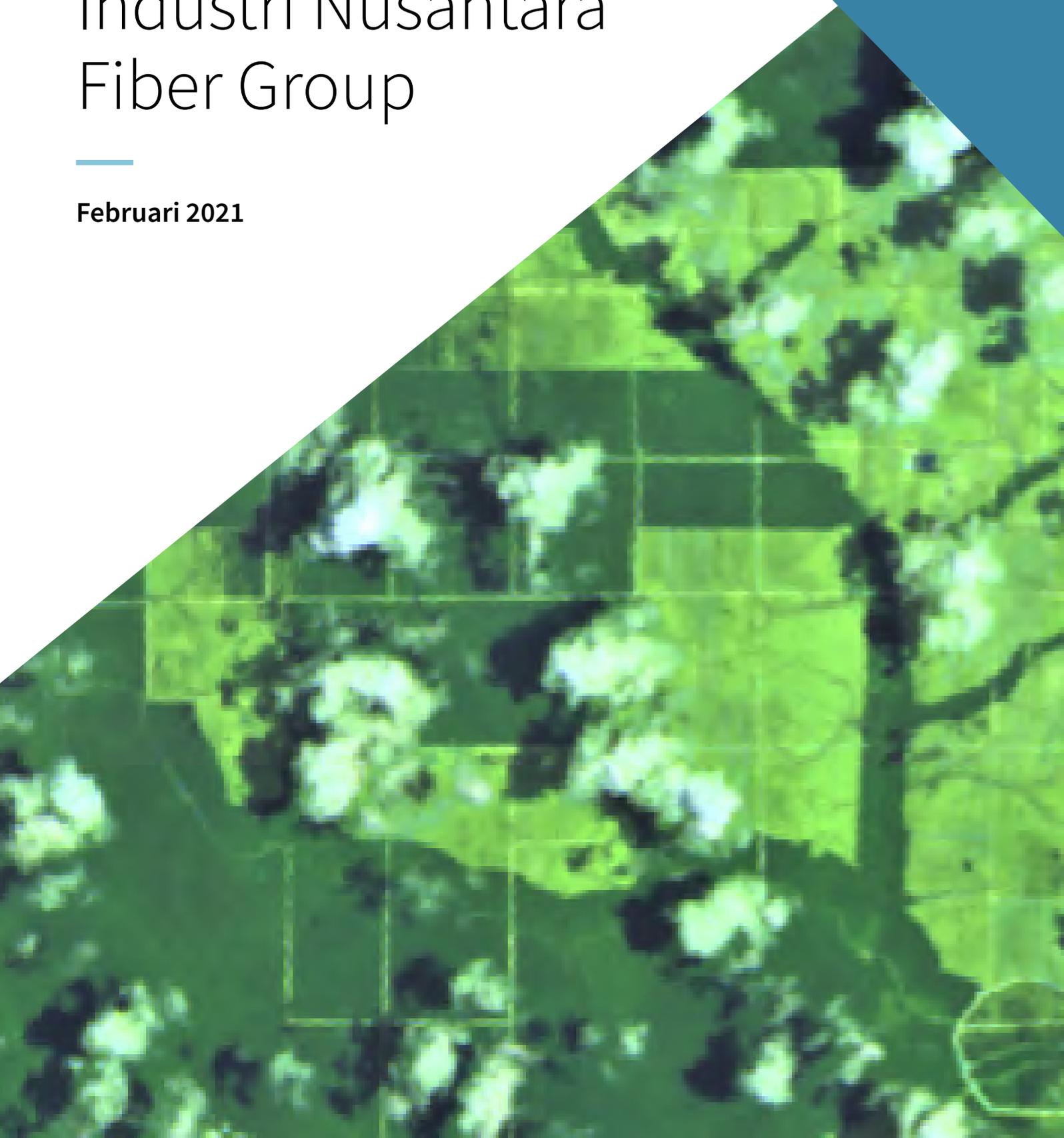


Hutan Tanaman Industri Nusantara Fiber Group

Februari 2021



Kolofon

aidenvironment

The industrial tree operations of the
Nusantara Fiber group

Laporan ini adalah bagian dari proyek berjudul
“Transformasi Korporat di Sektor Pulp dan Kertas Indonesia”

Yang didukung oleh

Good Energies Foundation

www.goodenergies.org

Februari 2021

Kontak:

www.aidenenvironment.org/pulpandpaper/

info@aidenenvironment.org

Gambar sampul depan:

Pembukaan hutan oleh anak perusahaan Nusantara
Fiber, PT Industrial Forest Plantation;

Citra satelit Landsat 8, awal bulan Oktober 2020

Gambar:

Gambar Hutan Tanaman Industri yang digunakan dalam
laporan ini diambil dengan bantuan Earth Equalizer
www.facebook.com/earthqualizerofficial/

Desain Grafis:

Grace Cunningham

www.linkedin.com/in/gracecunninghamdesign/

Aidenvironment

Barentszplein 7

1013 NJ Amsterdam

The Netherlands

+ 31 (0)20 686 81 11

www.aidenenvironment.org

info@aidenenvironment.org

Isi

		Ringkasan eksekutif	p. 6
		Kesimpulan dan rekomendasi	p. 8
		Pendahuluan	p. 11
<hr/>			
CHAPTER ONE			
Profil perusahaan	1	Nusantara Fiber Group: profil perusahaan	p. 12
	1.1	Hutan tanaman industri (HTI)	p. 13
	1.2	Struktur perusahaan	p. 14
<hr/>			
CHAPTER TWO			
Deforestasi untuk tanaman industri	2	Deforestasi oleh Nusantara Fiber Group	p. 16
	2.1	26.000 hektar hutan hilang sejak tahun 2016	p. 18
	2.2	PT Industrial Forest Plantation	p. 20
	2.3	PT Santan Borneo Abadi	p. 22
	2.4	PT Mahakam Persada Sakti	p. 25
	2.5	PT Bakayan Jaya Abadi	p.26
	2.6	PT Permata Hijau Khatulistiwa	p.27
<hr/>			
CHAPTER THREE			
Kelapa sawit	3	Perusahaan minyak kelapa sawit milik para direktur Nusantara Fiber	p. 28
	3.1	Setidaknya ada 27 pabrik kelapa sawit dan/atau pabrik inti sawit	p. 30
	3.2	RGE membeli hasil produksi dari setiap 27 perusahaan	p. 34
<hr/>			
CHAPTER FOUR			
Komitmen	4	Komitmen keberlanjutan pelaku usaha utama	p. 38
<hr/>			
CHAPTER FIVE			
Perusahaan pulp dan kertas yang dioperasikan oleh	5	Kegiatan pulp dan kertas RGE di Indonesia	p. 40
	5.1	Hutan tanaman industri seluas 1,6 juta hektar	p. 41
	5.2	Deforestasi oleh PT Permata Borneo Abadi	p. 45
	5.3	Deforestasi oleh PT Adindo Hutani Lestari	p. 47
	5.4	Mantan pemilik areal konsesi Nusantara Fiber	p. 48
<hr/>			
		Referensi	p. 50

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dari tahun 2016 sampai bulan Oktober 2020, grup yang terdiri dari enam perusahaan hutan tanaman industri (HTI) membuka 26.000 hektar hutan tropis di Kalimantan.

PERUSAHAAN-perusahaan tersebut dimiliki oleh grup yang sering disebut Nusantara Fiber Group. Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa selama periode tersebut, Nusantara Fiber Group melakukan paling banyak deforestasi di antara seluruh grup perusahaan yang memegang izin hutan tanaman industri di Indonesia.

Sekitar 50.000 hektar (ha) hutan masih bisa diselamatkan. Anak perusahaan HTI yang paling besar di grup ini adalah PT Industrial Forest Plantation dengan total luas areal konsesi sebesar 102.000 ha. Perusahaan tersebut membuka 10.700 ha hutan, di mana lebih dari separuh (5.800 ha) deforestasinya terjadi pada tahun 2020. Sebagian besar deforestasi tersebut terjadi di habitat orang utan yang terancam kritis. Per bulan Oktober 2020, 64.000 ha hutan masih tersisa di dalam areal konsesi ini, namun baru 15.800 ha saja yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. PT Santan Borneo Abadi, salah satu anak perusahaan HTI lain di grup tersebut, telah melakukan total deforestasi seluas 12.300 ha sejak tahun 2016.

Kepemilikan Nusantara Fiber Group dirahasiakan dari publik dan grup tersebut tidak mengumumkan komitmen Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi (No Deforestation, No Peat Development, and No Exploitation/NDPE). Grup ini dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di Samoa, salah satu negara di kepulauan Polinesia yang dikenal sebagai wilayah yurisdiksi kerahasiaan perusahaan. Meskipun laporan audit publik untuk beberapa areal konsesi mengacu pada kajian Nilai Konservasi Tinggi (NKT), tidak ada kajian yang tersedia untuk umum. Informasi mengenai penilaian Stok Karbon Tinggi (SKT) juga tidak tersedia.

‘Sebagai salah satu perusahaan pulp dan kertas terbesar di Indonesia, RGE telah gagal untuk meraangkul grup Nusantara Fiber ke dalam komitmen keberlanjutannya.’

Nusantara Fiber Group, dengan berbagai cara, terkait dengan Royal Golden Eagle (RGE), yaitu grup perusahaan besar di bidang kertas dan minyak sawit. Perusahaan induk Nusantara Fiber di Samoa mempunyai kepemilikan sebesar 100% terhadap sebuah anak perusahaan yang juga merupakan pemilik saham mayoritas di perusahaan-perusahaan HTI di bawah Nusantara Fiber. Anak perusahaan tersebut berbasis di Hong Kong bernama Green Meadows Fiber Products Limited. Dua dari tiga direktur pertama “Green Meadows” merupakan petinggi di RGE. Direktur utama lainnya juga terlibat atau pernah terlibat dalam berbagai perusahaan perkelapasawitan, yaitu 27 pabrik kelapa sawit dan/atau pabrik inti sawit, di mana RGE merupakan pembeli dari ke-27 perusahaan tersebut. Catatan sejarah mengenai riwayat kepemilikan berbagai anak perusahaan Nusantara Fiber Group memperlihatkan adanya kontrol di masa lalu oleh entitas yang merupakan bagian dari, atau berkaitan dengan RGE, sebelum anak perusahaan tersebut dipindahkan ke wilayah yurisdiksi kerahasiaan perusahaan.

Dalam tanggapan singkatnya terhadap draf laporan yang dikirim untuk peninjauan, RGE menyatakan “tidak mempunyai hubungan dengan keenam perusahaan yang disebut dalam laporan sebagai bagian dari Nusantara Fiber Group”.

Kebijakan NDPE perusahaan pengolahan minyak sawit di Indonesia terbatas pada komoditas kelapa sawit, sehingga membiarkan kesempatan bagi mitra usahanya untuk tetap melakukan deforestasi di sektor tanaman industri. Setidaknya terdapat 40 grup perusahaan yang aktif dalam usaha perkelapasawitan dan HTI. RGE memiliki pengaruh terhadap Nusantara Fiber Group karena peran besarnya

sebagai pembeli hasil produksi perusahaan kelapa sawit yang berafiliasi dengan Nusantara Fiber Group. Dengan membuat kebijakan NDPE antar komoditas, maka perusahaan pemurnian minyak sawit terbesar di Indonesia dapat menghentikan lebih banyak deforestasi dan menciptakan mitra usaha bebas deforestasi. Berkaitan dengan Nusantara Fiber Group, puluhan ribu hektar hutan dan habitat orang utan masih bisa diselamatkan.

Sebagai salah satu perusahaan pulp dan kertas terbesar di Indonesia, selama ini RGE gagal membawa Nusantara Fiber Group ke bawah pengawasan komitmen keberlanjutannya. Grup RGE mempunyai dua perusahaan pulp di Indonesia: APRIL yang memproduksi pulp dan kertas, dan APR yang memproduksi serat viscose rayon. Secara keseluruhan, 1,6 juta hektar atau 15 persen dari total areal konsesi HTI di Indonesia dimiliki atau berkaitan dengan RGE (termasuk Nusantara Fiber Group). Tiga kasus deforestasi dalam laporan ini (PT Adindo Hutani Lestari, PT Permata Borneo Abadi dan Nusantara Fiber Group) memperlihatkan bahwa masih terdapat celah dalam komitmen keberlanjutan RGE yang memungkinkan deforestasi oleh grup perusahaan dalam rantai pasoknya, atau mungkin di masa yang akan datang.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Nusantara Fiber Group membuka 26.000 hektar hutan di pulau Kalimantan dari tahun 2016 sampai bulan Oktober 2020.

Kesimpulan

Nusantara Fiber Group membuka 26.000 hektar hutan di pulau Kalimantan dari tahun 2016 sampai bulan Oktober 2020. Selama periode tersebut, Nusantara Fiber Group menjadi pelaku deforestasi yang paling besar di antara berbagai grup perusahaan dengan areal konsesi HTI di Indonesia. Puluhan ribu hektar hutan dan habitat orang utan masih tersisa di dalam areal konsesi Nusantara Fiber Group, dan terancam pembukaan dalam waktu dekat.

Di antara keempat pelaku usaha utama di sektor perkelapasawitan dan hutan tanaman industri di Indonesia (Sinar Mas, RGE, Wilmar dan Musim Mas), RGE menonjol sebagai grup perusahaan yang terkait dengan berbagai cara pada Nusantara Fiber Group.

Dua kasus deforestasi lainnya juga dapat dikaitkan dengan kegiatan operasional hutan tanaman industri grup RGE. RGE membiarkan kesempatan bagi grup perusahaan yang berkaitan dengannya untuk tetap melakukan deforestasi. Grup perusahaan tersebut

barangkali sudah atau akan termasuk dalam rantai pasokannya dalam waktu dekat. Hal ini menimbulkan berbagai tanda tanya akan komitmen RGE pada nol deforestasi.

Baik RGE maupun Nusantara Fiber Group menggunakan struktur perusahaan yang kurang transparan, sehingga memudahkannya untuk bersembunyi dari tanggung jawab atas kegiatan yang tidak berkelanjutan. Entitas pemilik Nusantara Fiber Group masih menjadi misteri.

Keempat perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit yang terbesar di Indonesia (Sinar Mas, RGE, Wilmar dan Musim Mas) membatasi kebijakan NDPEnya pada komoditas kelapa sawit. Mitra usaha di sektor perkelapasawitan tetap dapat melakukan kegiatan deforestasinya di sektor HTI. Sektor perkelapasawitan belum membawa Nusantara Fiber Group ke dalam pengawasan NDPE.

‘Grup perusahaan RGE seharusnya menggandeng grup Nusaantara Fiber, dan menggunakan kesempatannya untuk segera mendorong penghentian deforestasi saat ini dan di masa yang akan datang.’

Rekomendasi

Tindakan kolektif diperlukan untuk langsung menghentikan pembukaan 50.000 hektar hutan yang masih tersisa di areal konsesi anak perusahaan Nusantara Fiber, PT Industrial Forest Plantation.

Grup perusahaan RGE seharusnya menghadapi Nusantara Fiber Group, dan langsung menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan deforestasi, baik untuk saat ini maupun ke depan. Pengaruh tersebut seharusnya dimanfaatkan secara tegas atas usaha di bidang perkelapasawitan yang dijalankan oleh RGE dengan direktur maupun mantan direktur Nusantara Fiber Group.

Seharusnya Nusantara Fiber Group langsung menghentikan deforestasinya, menerbitkan penilaian NKT dan SKT untuk areal konsesinya, dan menetapkan kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi (NDPE).

Empat pemain korporasi utama menerima sebagian besar dari hasil panen kelapa sawit dan tanaman industri di Indonesia. Keempat perusahaan utama tersebut adalah Sinar Mas, RGE, Wilmar dan Musim Mas. Grup perusahaan ini seharusnya memperluas kebijakan NDPEnya, dan memastikan bahwa mitra usahanya tidak membuka hutan, baik untuk perkebunan kelapa sawit maupun hutan tanaman industri.

Perusahaan HTI seharusnya menghindari penggunaan struktur perusahaan yang kurang transparan karena hal tersebut menghalangi pertanggungjawabannya atas kegiatan yang tidak berkelanjutan.



PENDAHULUAN

Sektor pulp dan kertas di Indonesia hanya membuat sedikit kemajuan dalam hal keberlanjutan. Sektor hutan tanaman industri (HTI) merupakan sektor penanaman terbesar kedua di Indonesia setelah perkebunan kelapa sawit.

KAYU HTI digunakan untuk produksi kertas dan serat bahan tekstil, serta produk kayu dan pembangkitan energi.

Sektor HTI berbeda dengan sektor perkelapasawitan di Indonesia dalam hal komitmen keberlanjutan oleh pemiliknya. Sektor perkelapasawitan, setelah perluasan secara besar-besaran yang mengorbankan hutan, sekarang umumnya tercakup oleh kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi (NDPE). Sedangkan kemajuan di sektor HTI masih kurang dalam hal komitmen keberlanjutan.

Grup perusahaan Sinar Mas dan Royal Golden Eagle

Sektor hutan tanaman industri Indonesia didominasi oleh dua produsen pulp dan kertas besar, yaitu APP (Asia Pulp & Paper) dan APRIL (Asia Pacific Resources International Limited). APP dan APRIL merupakan bagian masing-masing dari grup perusahaan Sinar Mas dan Royal Golden Eagle (RGE). Kedua grup perusahaan

tersebut juga banyak menjalankan operasi pulp dan kertas di luar Indonesia (terutama di Tiongkok, Brasil dan Kanada), termasuk di antara perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit yang terbesar di dunia, dan mempunyai struktur kepemilikan yang rumit dan kurang transparan.

Laporan ini

Laporan ini membahas grup perusahaan bernama Nusantara Fiber Group yang dapat dikaitkan dengan grup perusahaan Royal Golden Eagle (RGE). Nusantara Fiber Group melakukan deforestasi besar-besaran untuk penanaman hutan tanaman industri di Indonesia.

1

NUSANTARA FIBER GROUP: PROFIL PERUSAHAAN

1.1

Hutan tanaman industri (HTI)

TOTAL luas areal hutan tanaman industri Nusantara Fiber Group mencapai 242.000 hektar di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Meskipun Nusantara Fiber Group memperoleh sebagian besar izinnya pada periode 2009-2011, kegiatan pembukaan lahan untuk penanaman pohon hutan tanaman (akasia dan ekaliptus) baru dimulai tahun 2016. Perusahaan tersebut belum menjual kayu dari hutan tanamannya karena pohonnya masih terlalu kecil.



Gambar 1

Lokasi areal konsesi HTI Nusantara Fiber Group

Sumber

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Buku Geospasial 2019, KLHK, Januari 2020, bit.ly/35dBiWf dan WebGIS - Peta Interaktif, bit.ly/2lwPnF0

PLANTATION COMPANY	PERMIT AREA (HA)	PROVINCE, DISTRICT	IUPHHK-HT	DATE (IUPH-HK-HT)
PT Industrial Forest Plantation (PT IFP)	101,840	Kapuas, Kalimantan Tengah	SK.664/Menhut-II/2009	15 Okt 2009
PT Santan Borneo Abadi (PT SBA)	37,825	Kutai Timur, Kalimantan Timur	SK.313/Menhut-II/2011	15 Jun 2011
PT Mahakam Persada Sakti (PT MPS)	25,410	Kutai Timur, Kalimantan Timur	SK.619/Menhut-II/2010	4 Nov 2010
PT Bakayan Jaya Abadi (PT BJA)	15,475	Kutai Barat, Kalimantan Timur	SK.236/Menhut-II/2011	21 Apr 2011
PT Permata Hijau Khatulistiwa (PT PHK)	26,345	Kutai Timur, Kalimantan Timur	SK.631/Menhut-II/2010	11 Nov 2010
PT Nusantara Kalimantan Lestari (PT NKL)	34,787	Ketapang, Kalimantan Barat	SK.390/Menhut-II/2006, SK.2/1/IUPHHK-PB/PMDN/2017	12 Jul 2006, 20 Mar 2017
TOTAL	241,682			

Tabel 1

Hutan tanaman industry milik Nusantara Fiber Group

Sumber

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Buku Geospasial 2019, KLHK, Januari 2020, bit.ly/35dBiWf dan WebGIS - Peta Interaktif, bit.ly/2lwPnF0

1.2

Struktur perusahaan

‘ Samoa berada dalam daftar Uni Eropa sebagai yurisdiksi yang tidak kooperatif untuk tujuan perpajakan karena adanya skema pajak istimewa yang membahayakan. ’

GAMBAR di bawah ini memperlihatkan struktur perusahaan Nusantara Fiber Group. Perusahaan induk, Green Meadows Holdings Limited, terdaftar di Samoa, salah satu negara di kepulauan Polinesia. Samoa masuk ke dalam daftar Uni Eropa mengenai wilayah yurisdiksi yang tidak kooperatif untuk urusan perpajakan, antara lain karena “rejim pajaknya yang berbahaya”.¹ Data mengenai kepemilikan, direktur dan komisaris perusahaan Samoa tidak tersedia untuk umum, sehingga tidak dapat diakses untuk keperluan laporan ini. Data tersebut juga tidak diberikan oleh perusahaan yang menanggapi versi draf laporan ini yang dikirim untuk keperluan peninjauan.²

Dua perusahaan sudah diketahui terlibat dalam kegiatan Nusantara Fiber Group. Perusahaan tersebut adalah Argyle Street Management Limited (Argyle) yang berbasis di Hong Kong sebagai pengelola investasi, dan perusahaan Malaysia bernama Acapalm Plantation Services Sdn Bhd (Acapalm) sebagai pengelola hutan tanaman. Dalam

tanggapannya terhadap draf laporan yang dikirim untuk peninjauan, Argyle menekankan bahwa perusahaannya tidak punya kontrol terhadap Nusantara Fiber Group, baik secara langsung maupun tidak langsung.³

Perusahaan induk Nusantara Fiber di Samoa mempunyai 100% kepemilikan terhadap anak perusahaan yang juga merupakan pemilik saham mayoritas di perusahaan-perusahaan HTI di bawah Nusantara Fiber. Anak perusahaan tersebut, yang berbasis di Hong Kong, bernama Green Meadows Fiber Products Limited.

Tiga direktur pertamanya adalah:⁴

Chew Chong Pan

Chew Chong Pan pernah bekerja di RGE dari tahun 2007 sampai 2014 dan terlibat dalam pembelian kepemilikan saham perusahaan HTI.⁵ Saat ini dia sebagai salah satu karyawan utama dan pemilik 50% saham Acapalm.⁶

Sia Siew Kiang

Sia Siew Kiang (panggilan Willie) menjadi karyawan atasan di grup perusahaan Royal Golden Eagle (RGE) sejak tahun 2002, dengan keahlian di bidang akuntansi, perpajakan dan keuangan perusahaan.⁷ Dalam tanggapan terhadap draf laporan yang dikirim untuk peninjauan, Argyle menyatakan bahwa Sia Siew Kiang adalah mantan karyawan Acapalm yang bekerja selama beberapa waktu dan keluar pada tahun 2016.⁸

Pit Tat Peh (Peter Peh)

Peter Peh menjabat sebagai direktur utama di perusahaan pengelolaan aset yang berbasis di Hong Kong bernama Argyle Street Management Limited.⁹

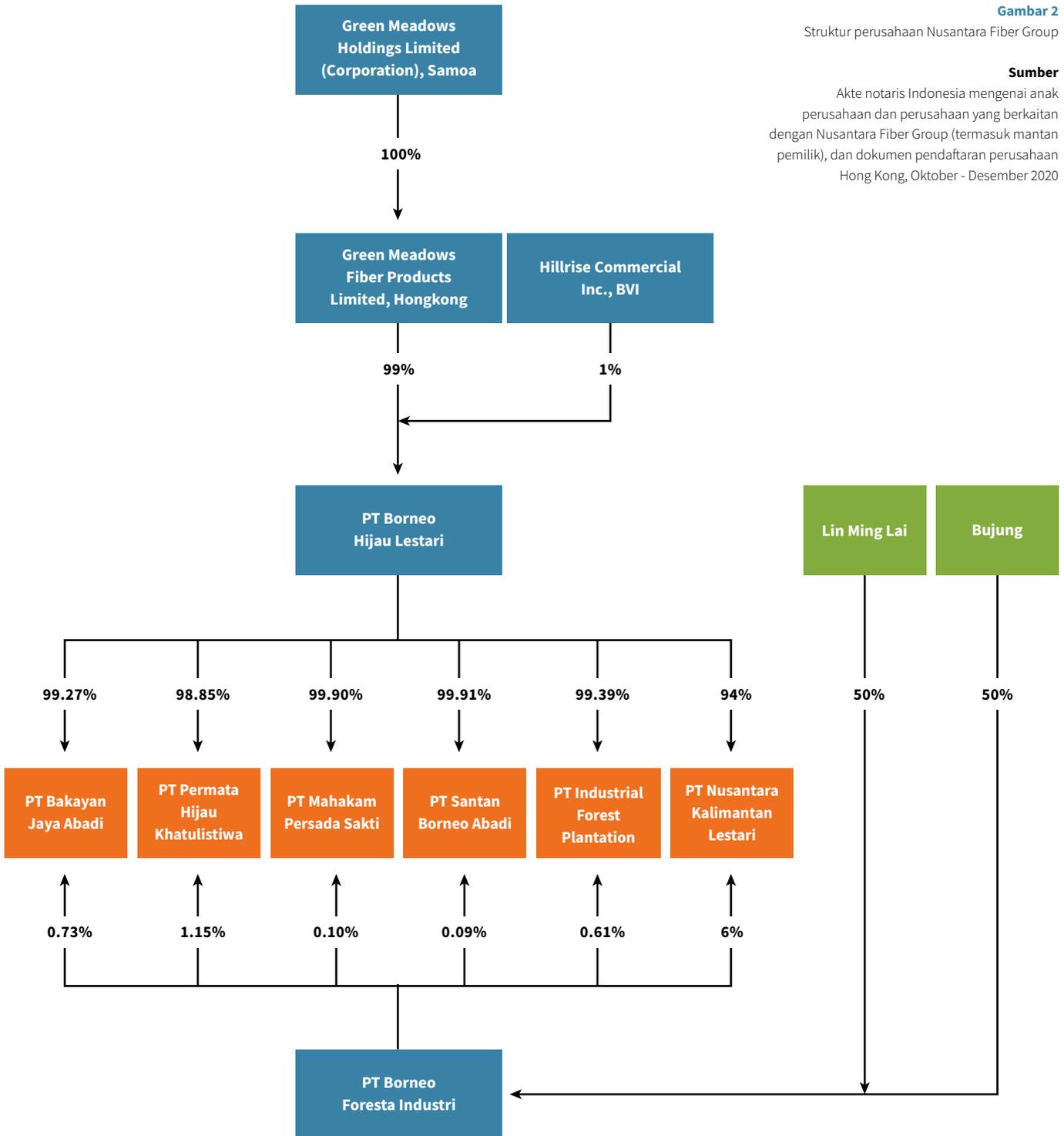
Di liputan berita dan akun media sosial, grup `Green Meadows` lebih sering disebut Nusantara Fiber Group.¹⁰

Gambar 2

Struktur perusahaan Nusantara Fiber Group

Sumber

Akte notaris Indonesia mengenai anak perusahaan dan perusahaan yang berkaitan dengan Nusantara Fiber Group (termasuk mantan pemilik), dan dokumen pendaftaran perusahaan Hong Kong, Oktober - Desember 2020



KUNCI

- Perusahaan induk
- Perusahaan perkebunan/tanaman
- Orang

2

DEFORESTASI OLEH NUSANTARA FIBER GROUP



PT Industrial Forest Plantation
January 2021
© Aidenvironment

2.1

26.000 hektar hutan hilang sejak tahun 2016

Dari tahun 2016 sampai akhir bulan Oktober 2020, Nusantara Fiber Group membuka 26.000 hektar hutan.

DARI tahun 2016 sampai akhir bulan Oktober 2020, Nusantara Fiber Group membuka 26.000 hektar hutan. Hal ini diketahui dari citra satelit yang ditumpangtindihkan dengan Peta Tutupan

Lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Tabel di bawah ini memperlihatkan deforestasi yang dilakukan per tahun oleh masing-masing perusahaan HTI.

Tabel 2
Deforestasi oleh anak perusahaan HTI Nusantara Fiber sejak tahun 2016

Sumber
Planet.com, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Peta Tutupan Lahan 2016.

PERUSAHAAN HTI	2016	2017	2018	2019	2020 (JAN-OKT)	TOTAL
PT Industrial Forest Plantation (PT IFP)	354	477	819	3,223	5,845	10,718
PT Santan Borneo Abadi (PT SBA)	991	4,024	4,368	2,434	435	12,252
PT Mahakam Persada Sakti (PT MPS)	1,218	494	44	46	35	1,837
PT Bakayan Jaya Abadi (PT BJA)	20	0	12	573	187	792
PT Permata Hijau Khatulistiwa (PT PHK)	232	18	126	116	4	496
PT Nusantara Kalimantan Lestari (PT NKL)	10	7	3	3	6	29
TOTAL	2,825	5,020	5,372	6,395	6,512	26,124



PT Industrial Forest Plantation
January 2021
© Aidenvironment

Aidenvironment menggolongkan seluruh konsesi HTI di Indonesia berdasarkan grup perusahaan. Setelah itu, Aidenvironment melakukan analisis spasial terhadap deforestasi yang dilakukan dengan menggunakan citra satelit, peta tutupan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan peta Global Forest Watch dengan kehilangan tutupan pohon (>75% kepadatan kanopi) pada periode tahun 2016-2019.¹¹ Dari analisis spasial tersebut, terlihat jelas bahwa dari tahun 2016 sampai akhir bulan Oktober 2020, Nusantara Fiber Group menjadi pelaku deforestasi yang paling besar di antara berbagai grup perusahaan dengan areal konsesi HTI di Indonesia.

Penilaian NKT dan SKT

Pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan HTI Indonesia untuk memenuhi standar minimum dalam pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atau PHPL). Rangkuman dokumen audit oleh badan sertifikasi seringkali tersedia untuk umum. Beberapa dokumen audit terhadap anak

perusahaan HTI Nusantara Fiber mengacu pada penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang sepertinya pernah dilakukan. Tidak satupun penilaian NKT untuk anak perusahaan HTI Nusantara Fiber tersedia untuk umum. Dokumen audit maupun informasi publik lainnya tidak menyinggung penilaian Stok Karbon Tinggi (SKT) yang mungkin pernah dilakukan untuk anak perusahaan HTI Nusantara Fiber.

Tanggapan dari perusahaan HTI

Menanggapi draf laporan yang dikirim untuk peninjauan, Argyle menyatakan telah menghubungi perusahaan-perusahaan HTI, dan perusahaan tersebut sudah melakukan pengecekan terhadap hal-hal yang diutarakan dalam draf laporan. Menurutnya, perusahaan tersebut beroperasi di lahan terdegradasi di Kalimantan, melaksanakan pengelolaan HTI secara berkelanjutan, dan beroperasi berdasarkan rencana kerja umum (RKU) dan rencana kerja tahunan (RKT), yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Sepertinya perusahaan-

perusahaan HTI tersebut merasa yakin bahwa kegiatannya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹² Memang, Pemerintah Indonesia tidak melarang seluruh kegiatan pembukaan hutan. Namun demikian, kasus yang dibahas di bagian-bagian berikut memperlihatkan bahwa areal yang telah dibuka merupakan hutan sekunder yang berharga, dan bukan lahan terdegradasi.

2.2

PT Industrial Forest Plantation

ANAK perusahaan HTI Nusantara Fiber bernama PT Industrial Forest Plantation (PT IFP), yang berlokasi di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, mempunyai areal konsesi seluas 101.840 hektar.

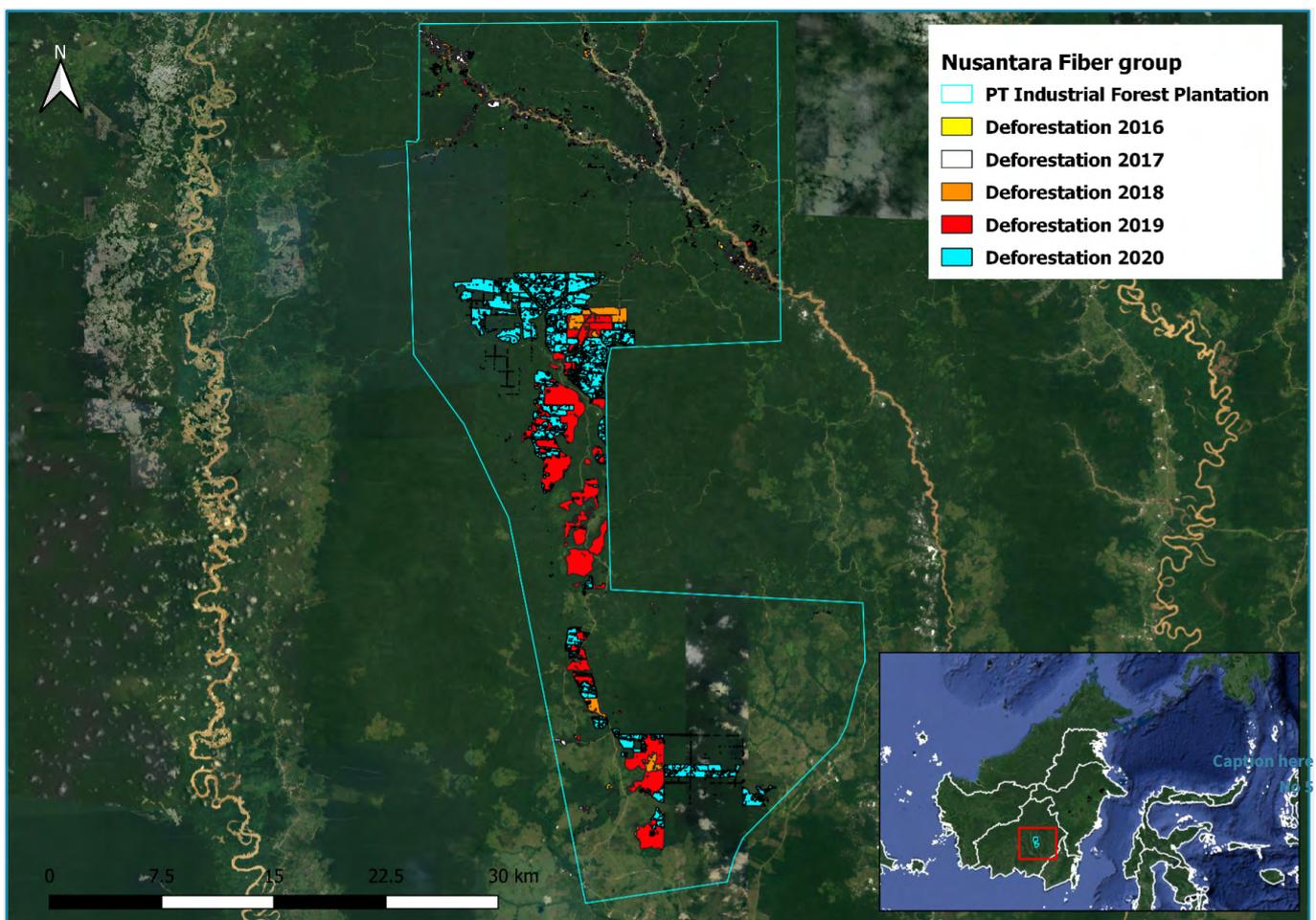
PT IFP melakukan deforestasi seluas 10.700 hektar dari tahun 2016 sampai akhir bulan Oktober 2020. Sebagian besar deforestasi tersebut terjadi pada tahun 2020 (5.800 hektar) dan 2019 (3.200 hektar).

Gambar 3

Deforestasi oleh anak perusahaan Nusantara Fiber, PT Industrial Forest Plantation

Sumber

Google Maps, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Peta Tutupan Lahan 2016.



Hutan dan habitat orang utan yang masih tersisa

Gambar di bawah ini memperlihatkan bahwa sebagian besar areal konsesi tersebut masih berhutan pada akhir bulan Oktober 2020. Luas hutan yang masih tersisa mencapai 64.000 hektar. Audit yang dilakukan oleh salah satu badan sertifikasi menyimpulkan bahwa pada bulan Juni 2019, luas kawasan lindung yang ditetapkan di PT IFP mencapai 15.800 hektar, di mana 80 persen di antaranya adalah hutan.¹³ Ini berarti lebih dari 50.000 hektar hutan masih terancam pembukaan oleh PT IFP dalam waktu dekat.

Setiap beberapa tahun sekali, para ahli melaksanakan penilaian luas terhadap habitat orang utan di Indonesia. Penilaian terbaru dilakukan pada tahun 2016 dan diterbitkan pada tahun 2017. Hampir setiap habitat yang dipetakan oleh para ahli tersebut tumpang tindih dengan hutan yang ada di dalam areal konsesi berdasarkan Peta Tutupan Lahan 2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.¹⁴ Areal konsesi itu merupakan habitat orang utan Kalimantan barat daya

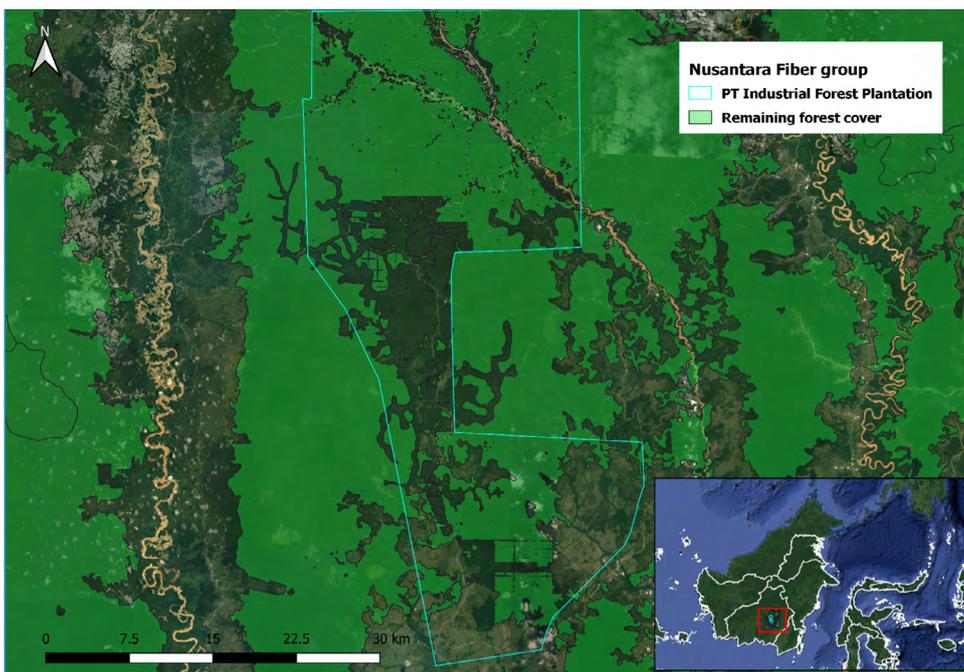
(*Pongo pygmaeus wurmbii*), yaitu subspecies dari spesies orang utan Kalimantan. Spesies orang utan terancam kritis, menurut Daftar Merah Spesies Terancam IUCN.¹⁵

Kawasan lindung dan klaim lahan

Kawasan lindung seluas 15.800 hektar terdiri dari sempadan sungai seluas 3.600 hektar, daerah perlindungan satwa liar (DPSL) seluas 3.200 hektar, kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN) seluas 3.300 hektar, dan kawasan hutan bergambut seluas 5.700 hektar. Penilaian dari tahun 2014 atas nama PT IFP telah memastikan keberadaan orang utan di dalam batas areal konsesi, serta jenis satwa lain dan tanaman yang dilindungi, termasuk 29 spesies burung, 22 spesies mamalia, 6 jenis reptil dan 15 spesies pohon dan tanaman.¹⁶

Dokumen audit dari badan sertifikasi pada bulan Juli 2020 mengidentifikasi konflik lahan di dalam areal konsesi berupa klaim oleh masyarakat/petani atas total lahan seluas 22.100 hektar.¹⁷

‘Artinya, lebih dari 50.000 hektar hutan berada dalam bahaya deforestasi.’



Gambar 4
Hutan yang tersisa di PT Industrial Forest Plantation per akhir bulan Oktober 2020

Sumber
Peta Tutupan Lahan 2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan citra satelit per bulan Oktober 2020.

2.3

PT Santan Borneo Abadi

ANAK perusahaan HTI Nusantara Fiber bernama PT Santan Borneo Abadi (PT SBA), yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai areal konsesi seluas 37.825 hektar.

PT SBA melakukan deforestasi seluas 12.300 hektar dari tahun 2016 sampai akhir bulan Oktober 2020. Sebagian besar deforestasi tersebut terjadi pada tahun 2018 (4.400 hektar), 2017 (4.000 hektar) dan 2019 (2.400 hektar).

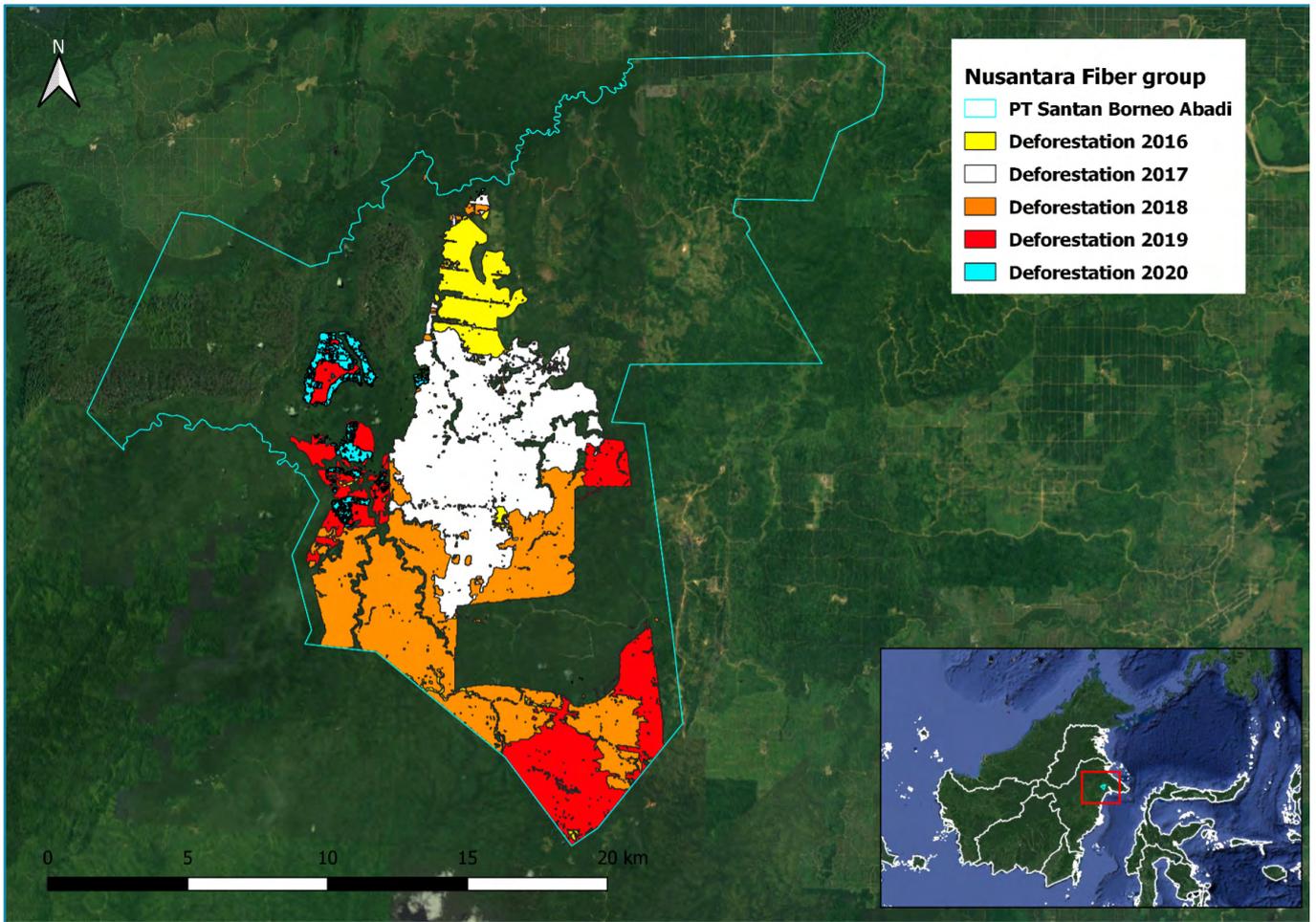
Batas izin PT SBA bertumpang tindih sebagian dengan areal konsesi tambang. Deforestasi di dalam areal konsesi sejak tahun 2016 yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan pertambangan tidak termasuk dalam penghitungan deforestasi oleh PT SBA sejak tahun 2016.¹⁸

Kawasan lindung dan klaim lahan

PT SBA mempunyai kawasan lindung seluas 8.817 hektar, di mana sebagian besar terdiri dari kawasan lindung seluas 4.531 hektar yang ditentukan dalam laporan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), hutan lindung seluas 2.191 hektar, dan sempadan sungai seluas 1.191 hektar. Berdasarkan dokumen audit dari bulan Desember 2019 dan Desember 2020, gangguan dan kegiatan budi daya masih terjadi di dalam kawasan lindung. Dokumen audit dari bulan Desember 2019 juga menyatakan bahwa kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan dekat kawasan konservasi pada tahun 2019 mengganggu keberadaan orang utan di kawasan tersebut.¹⁹

Dokumen audit dari badan sertifikasi pada bulan Desember 2020 juga mengidentifikasi konflik lahan di dalam areal konsesi berupa penyerobotan dan klaim oleh masyarakat atas lahan seluas 5.100 hektar. Selain itu, terjadi tumpang tindih lahan dengan areal izin pertambangan seluas 5.100 hektar dan areal perkebunan kelapa sawit seluas 700 hektar.²⁰

‘... tetap ada gangguan dan kegiatan penanaman di area dilindungi.’



Gambar 5

Deforestasi oleh anak perusahaan Nusantara Fiber, PT Santan Borneo Abadi

Sumber

Google Maps, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Peta Tutupan Lahan 2016

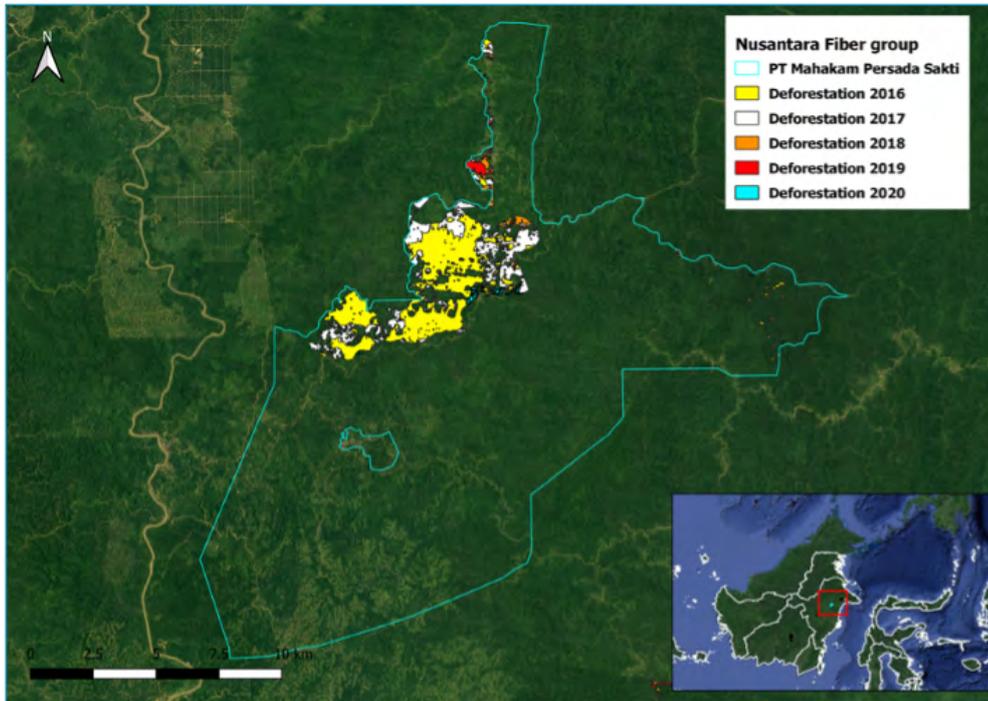
‘ disebutkan juga bahwa pada tahun 2019, pembukaan lahan dekat dengan area konservasi telah menyebabkan gangguan terhadap orangutan di area tersebut.’



Orangutan muda berpelukan di area pengenalan kembali oraanh utan di Nyaru Menteng dekat Palangka Raya, Kalimantan Tengah
April 2017
© Markus Mauthe / Greenpeace

2.4

PT Mahakam Persada Sakti



Gambar 6

Deforestasi oleh anak perusahaan Nusantara Fiber, PT Mahakam Persada Sakti

Sumber

Google Maps, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Peta Tutupan Lahan 2016.

ANAK perusahaan HTI Nusantara Fiber bernama PT Mahakam Persada Sakti (PT MPS), yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai areal konsesi seluas 25.410 hektar.

PT MPS melakukan deforestasi seluas 1.800 hektar dari tahun 2016 sampai akhir bulan Oktober 2020. Sebagian besar deforestasi tersebut (1.200 hektar) terjadi pada tahun 2016.

Kawasan lindung dan klaim lahan

Dokumen audit dari salah satu badan sertifikasi pada bulan Januari 2020 menyatakan bahwa PT MPS mempunyai

penetapan kawasan lindung seluas 3.363 hektar yang terdiri dari sempadan sungai seluas 1.441 hektar, daerah perlindungan satwa liar (DPSL) seluas 337 hektar, kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN) seluas 463 hektar, dan kawasan lindung lain/NKT seluas 1.122 hektar. Berdasarkan dokumen tersebut, gangguan dan kegiatan budi daya masih terjadi di dalam kawasan lindung.²¹

Dokumen audit dari bulan Januari 2020 mengacu pada laporan dari tahun 2016, di mana 10 spesies tanaman dan 9 species satwa (termasuk orang utan) yang teridentifikasi di dalam areal konsesi PT MPS berstatus terancam kritis, terancam berbahaya atau rentan di Daftar Merah IUCN.²²

Dokumen audit dari bulan Januari 2019 menyatakan bahwa menurut salah satu kepala desa, orang utan masih sering masuk kebun masyarakat untuk mencari makanan.²³

Berdasarkan dokumen audit dari badan sertifikasi pada bulan Januari 2020, PT MPS terlibat dalam konflik klaim lahan dengan masyarakat seluas 3.453 hektar pada akhir tahun 2019.²⁴

2.5

PT Bakayan Jaya Abadi

ANAK perusahaan HTI Nusantara Fiber bernama PT Bakayan Jaya Abadi (PT BJA), yang berlokasi di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai areal konsesi seluas 15.475 hektar.

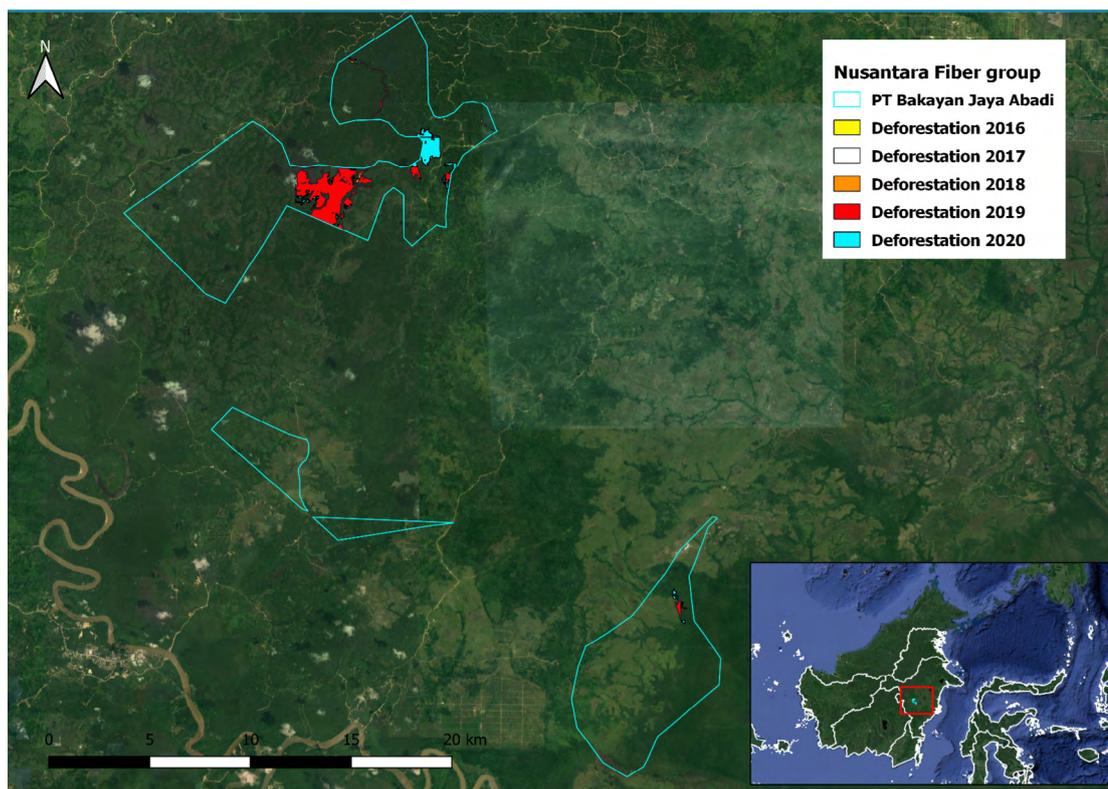
PT BJA melakukan deforestasi seluas 800 hektar dari tahun 2016 sampai akhir bulan Oktober 2020. Sebagian besar deforestasi tersebut (600 hektar) terjadi pada tahun 2019.

Kawasan lindung dan klaim lahan

Dokumen audit dari badan sertifikasi pada bulan Maret 2020 menyebutkan kawasan lindung seluas 2.274 hektar, yang terdiri dari daerah perlindungan satwa liar seluas

1.135 hektar, sempadan sungai seluas 789 hektar, dan kawasan konservasi plasma nutfah seluas 350 hektar.²⁵

Dokumen audit tersebut juga menyatakan bahwa pemerintah sudah menetapkan perubahan fungsi untuk tiga kawasan di sebelah selatan kawasan besar di PT BJA. Sekitar 6.100 hektar sudah beralih fungsi dari hutan produksi (HP) menjadi areal penggunaan lain (APL). Menurut dokumen audit tersebut, peralihan fungsi kawasan berkaitan terutama dengan tumpang tindih lahan dengan areal konsesi perusahaan kelapa sawit PT Kalimantan Agro Makmur di wilayah itu.²⁶



Gambar 7

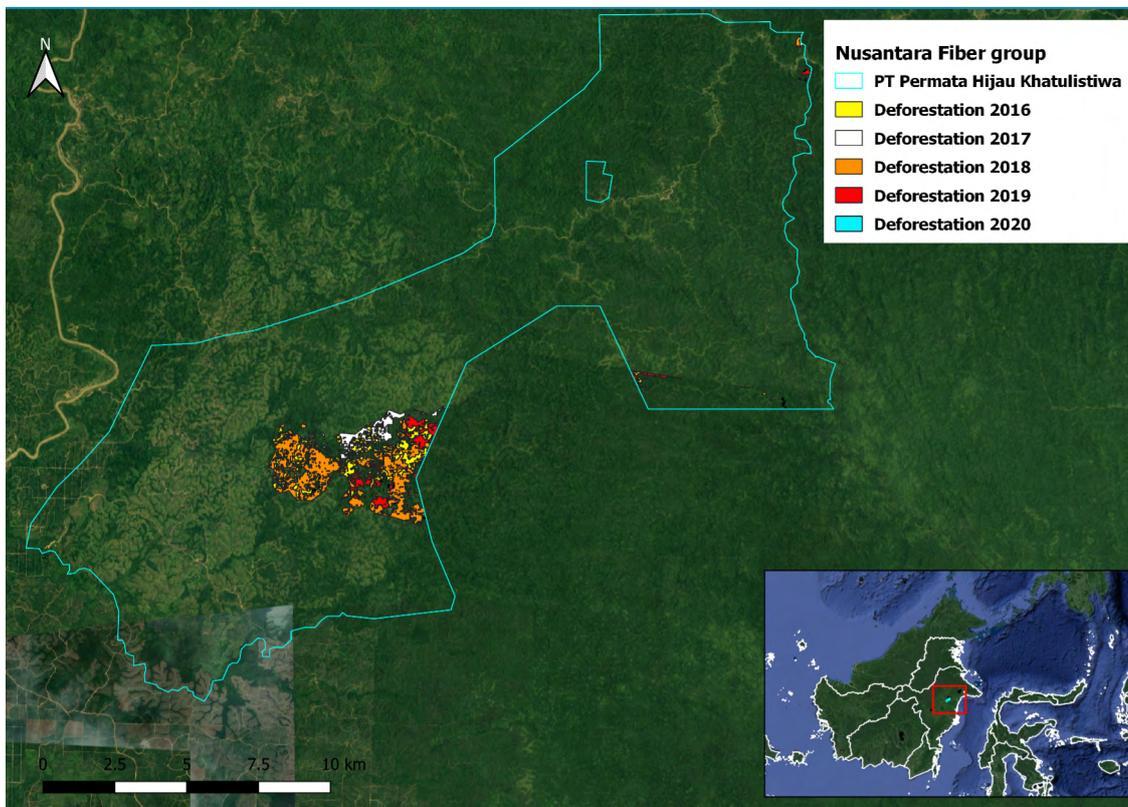
Deforestasi oleh anak perusahaan Nusantara Fiber, PT Bakayan Jaya Abadi

Sumber

Google Maps, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Peta Tutupan Lahan 2016

2.6

PT Permata Hijau Khatulistiwa



Gambar 8

Deforestasi oleh anak perusahaan Nusantara Fiber, PT Permata Hijau Khatulistiwa

Sumber

Google Maps, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Peta Tutupan Lahan 2016

ANAK perusahaan HTI Nusantara Fiber bernama PT Permata Hijau Khatulistiwa (PT PHK), yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai areal konsesi seluas 26.345 hektar.

PT PHK melakukan deforestasi seluas 500 hektar dari tahun 2016 sampai akhir bulan Oktober 2020.

Kawasan lindung dan klaim lahan

Dokumen audit dari salah satu badan sertifikasi pada bulan Maret 2020 mengacu pada surat keputusan mengenai kawasan lindung oleh direksi PT PHK pada tahun 2017. Surat keputusan tersebut menyebutkan kawasan lindung seluas 3.558 hektar yang terdiri

dari sempadan sungai seluas 2.026 hektar, daerah perlindungan satwa liar (DPSL) seluas 543 hektar, kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN) seluas 300 hektar, kawasan penyangga hutan lindung seluas 327 hektar, dan bagian lain seluas 362 hektar yang bertumpang tindih dengan kawasan taman nasional. Dokumen tersebut juga menyatakan terdapat gangguan dalam pelestarian satwa yang dilindungi sebagai akibat dari keberadaan dan kegiatan operasional PT PHK. Masyarakat setempat semakin jarang menemukan satwa di sekelilingnya. Selain itu, pembalakan liar terjadi di dalam areal DPSL.²⁷

Berdasarkan dokumen audit dari badan sertifikasi pada bulan Maret 2020, PT PHK terlibat dalam konflik klaim lahan dengan masyarakat seluas 3.981 hektar pada tahun 2019.²⁸

3

PERUSAHAAN MINYAK KELAPA SAWIT MILIK PARA DIREKTUR NUSANTARA FIBER



PT Industrial Forest Plantation
January 2021
© Aidenvironment

3.1

Setidaknya ada 27 pabrik kelapa sawit dan/atau pabrik inti sawit

Dua dari tiga direktur pertama

Dua dari tiga direktur pertama di perusahaan berbasis Hong Kong, Green Meadows Fiber Products Limited, yaitu Chew Chong Pan dan Pit Tat Peh (Peter Peh), sudah lama bekerja bersama di bidang perkelapasawitan. Dalam hal ini, kegiatan operasional grup perusahaan DTK Opportunity Limited (selanjutnya DTK) yang paling menonjol. DTK mempunyai bank tanah kelapa sawit di atas 150.000 hektar di pulau Kalimantan dan Papua, dan memproduksi minyak sawit mentah (crude palm oil) di lima pabrik kelapa sawit.²⁹



PT Industrial Forest Plantation
January 2021
© Aidenvironment



Orangutan terancam punah di Kalimantan Tengah. Peta tumpang tindih konsesi PT IFP dengan distribusi lokasi orangutan
© Aidenvironment

DTK

Selama bertahun-tahun, Chew Chong Pan pernah menjadi salah satu direktur dan pemilik sebagian di perusahaan Malaysia, Acapalm Plantation Services Sdn Bhd (selanjutnya Acapalm). Sekarang dia adalah pemilik 50 persen saham di perusahaan tersebut.³⁰ Acapalm mengelola konsesi DTK,³¹ serta konsesi Nusantara Fiber Group.³² Chew Chong Pan juga tercantum di Direktori Asuransi Malaysia 2020/2021 sebagai direktur perusahaan Oriental Insurance (Labuan) Pcc Limited. Berdasarkan direktori tersebut, perusahaan itu adalah salah satu anak perusahaan DTK.³³ Chew Chong Pan, yang bekerja di Royal Golden Eagle dari tahun 2007 sampai 2014, terkait dengan pembelian dan pengaturan peralihan empat perusahaan perkebunan oleh RGE pada bulan Mei 2018 yang akhirnya menjadi bagian dari DTK.³⁴ Pada saat DTK berhadapan dengan kasus deforestasi yang dilakukan oleh salah satu perusahaan perkebunannya, PT Lahan Agro Inti Ketapang pada tahun 2017, DTK menjual perusahaan tersebut kepada Meadows

Capital Sdn Bhd, di mana Chew Chong Pan menjadi salah satu dari kedua direktur yang tersebut di atas.³⁵

Peter Peh adalah salah satu eksekutif manajemen di Argyle Street Management Limited (Argyle), yaitu hedge fund atau perusahaan pengelola investasi yang berbasis di Hong Kong.³⁶ Argyle berperan besar di DTK Opportunity Limited, yang terdaftar di British Virgin Islands. Per awal tahun 2017, tiga perusahaan yang berbasis di Hong Kong tersebut teridentifikasi berada di antara DTK dan perusahaan-perusahaan perkebunan. Ketiga perusahaan tersebut berdomisili di alamat yang sama dengan Argyle. Selain itu, dua dari tiga perusahaan tersebut mempunyai direktur tunggal yang juga merangkap sebagai wakil manajemen Argyle. Peter Peh adalah salah satunya. Pengumuman kepada Bursa Efek Singapura tertanggal April 2015 menyebutkan jabatan oleh Chan Kin, yaitu Direktur Investasi di Argyle, sebagai direktur perusahaan yang bernama DTK Opportunity Fund.³⁷

DTK Opportunity Fund terdaftar di Kepulauan Cayman dan dikelola oleh Argyle.³⁸ Per bulan Juni 2020, empat perusahaan yang berbasis di Hong Kong teridentifikasi di posisi antara DTK dan perusahaan-perusahaan perkebunan. Tiga dari empat perusahaan tersebut mempunyai direktur tunggal yang juga merangkap sebagai wakil manajemen Argyle.³⁹

Menanggapi draf laporan yang dikirim untuk peninjauan, Argyle menyatakan dirinya sebagai manajer investasi untuk DTK Opportunity Fund (DTK). Selain itu, dinyatakan bahwa Argyle dan DTK tidak berkaitan dengan perusahaan-perusahaan Nusantara Fiber dalam arti perusahaan Nusantara Fiber bukanlah investasi yang dilakukan oleh Argyle.⁴⁰

Selain pekerjaannya di Argyle, dari bulan Juli 2011 sampai April 2015, Peter Peh pernah menjadi Direktur Non-Eksekutif di perusahaan United Fiber System Limited (sekarang bernama Golden Energy and Resources Limited).⁴¹

Sunny Vision group

Chew Chong Pan dan Peter Peh juga bekerjasama di perusahaan kelapa sawit Sunny Vision Group yang, antara lain, memiliki saham mayoritas di pabrik kelapa sawit PT Sabang Sawit Nusantara. Perusahaan induknya adalah Sunny Vision Holdings Limited (Corporation) yang terdaftar dengan alamat di Samoa yang sama dengan Green Meadows Holdings Limited (Corporation).⁴² Perusahaan Hong Kong, yang berdiri di antara perusahaan induk di Samoa dan perusahaan pabrik kelapa sawit di Indonesia, bernama Sunny Vision Group Limited. Per tanggal 30 Juli 2018, Chew Chong Pan dan Peter Peh menjabat sebagai kedua direktornya.

Di Sunny Vision dan Green Meadows, saat ini Chew Chong Pan adalah salah satu dari dua direktur perusahaan Hong Kong yang berdiri di antara perusahaan induk di Samoa dan perusahaan operasional di Indonesia. Peter Peh mundur dari jabatan direktur di kedua perusahaan tersebut pada tahun 2018, diganti dengan Pit Chee Peh.

Meskipun nama-nama ini terdengar mirip, hubungan keluarga di antaranya tidak teridentifikasi selama proses penyusunan laporan ini.⁴³

Kegiatan perkelapasawitan lain yang dikaitkan dengan Chew Chong Pan dan Peter Peh

Pada bulan Maret 2020, Peter Peh menjabat sebagai direktur di perusahaan BUP Investment Limited, yaitu perusahaan yang berbasis di Hong Kong dan berdiri di antara perusahaan British Virgin Islands, Sabeni Limited (Corporation) dan beberapa perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Pada bulan Juni 2020, Peter Peh diganti dengan Wui Hang Liu, yang juga bekerja di Argyle.⁴⁴

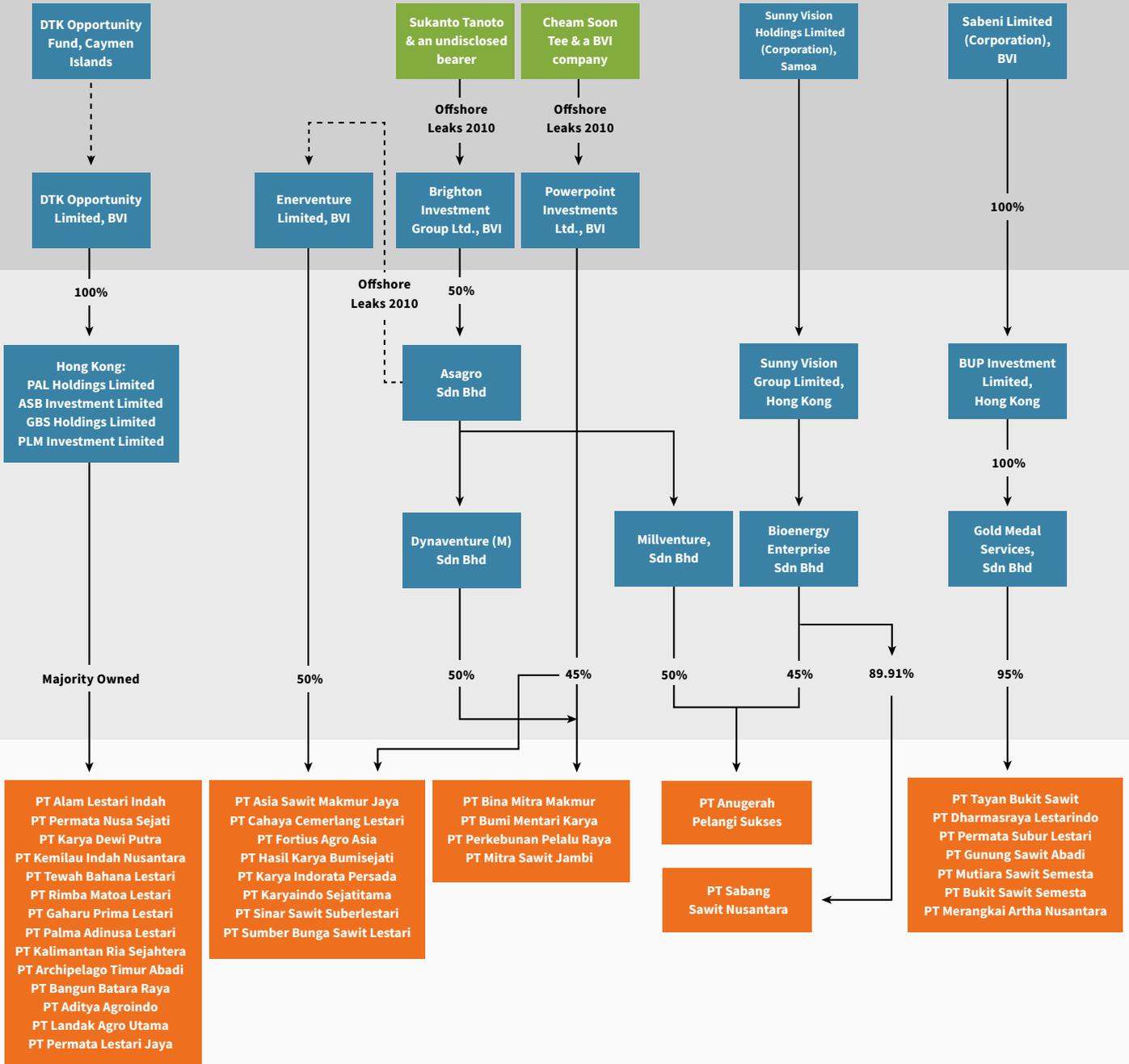
Chew Chong Pan adalah salah satu dari tujuh direktur perusahaan Malaysia, Asagro Sdn Bhd yang memiliki 50% saham di beberapa perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Indonesia.⁴⁵ Perusahaan Brighton Investment Group Ltd (terdaftar di British Virgin Islands) adalah pemilik 50% saham di Asagro Sdn Bhd. Berdasarkan basis

data Offshore Leaks dari The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), Sukanto Tanoto adalah salah satu dari dua pemegang saham di Brighton Investment Group Ltd.⁴⁶ Oleh karena informasi yang terdapat di basis data ICIJ berlaku pada tahun 2010, maka kepemilikan Brighton barangkali sudah berubah. Basis data ICIJ juga mengungkapkan kepemilikan 45% oleh perusahaan Powerpoints Investments Ltd (terdaftar di British Virgin Islands) atas selusin perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Cheam Soon Tee juga dinyatakan sebagai pemegang saham dalam basis data tersebut.⁴⁷ Cheam Soon Tee pernah menjabat sebagai presiden APRIL di Tiongkok.⁴⁸

Gambar di bawah ini menyajikan struktur perusahaan yang disederhanakan mengenai perusahaan kelapa sawit milik para direktur Nusantara Fiber. Perusahaan para direktur Nusantara Fiber tersebut terdiri dari 35 perusahaan perkebunan, pabrik kelapa sawit dan/atau pabrik inti sawit di Indonesia, sebagaimana digambarkan dengan kotak berwarna oranye.



PT Industrial Forest Plantation
January 2021
© Aidenvironment



KUNCI

- Perusahaan lain
- Kegiatan operasional kelapa sawit
- Orang
- Yurisdiksi rahasia
- Perusahaan berbasis di Hong Kong & Malaysia
- Perusahaan perkebunan di Indonesia & perusahaan pengolahan minyak sawit/inti sawit

Gambar 9

Struktur perusahaan kelapa sawit milik para direktur Nusantara Fiber

Sumber

Berkas registrasi perusahaan yang terdaftar di Indonesia, Hong Kong dan Malaysia

3.2

RGE membeli hasil produksi dari setiap 27 perusahaan

DARI 35 perusahaan minyak kelapa sawit milik direktur Nusantara Fiber, 27 perusahaan di antaranya teridentifikasi sebagai pemilik pabrik kelapa sawit dan/atau pabrik inti sawit. Untuk ke-27 perusahaan tersebut, hubungan rantai pasok dapat ditemukan di daftar pemasok yang diumumkan oleh perusahaan dagang/pengolahan besar sebagai bagian dari penerapan kebijakan NDPEnya.

Keempat perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit yang terbesar di Indonesia adalah Wilmar International, Musim Mas, Golden Agri-Resources dan Royal Golden Eagle (Apical), yang secara bersama mencakup lebih dari 60 persen kapasitas pengolahan minyak kelapa sawit di Indonesia.⁴⁹ Lagipula, keempat perusahaan tersebut diketahui melakukan pembelian langsung dari pabrik kelapa sawit dan/atau pabrik inti sawit.

Perusahaan dagang/pengolahan yang lebih kecil seringkali menggabungkan pembelian langsungnya dengan pembelian tidak langsung, biasanya dari keempat perusahaan pengolahan yang paling besar tersebut.

Tabel di bawah ini memperlihatkan hubungan rantai pasokan antara ke-27 perusahaan minyak kelapa sawit milik para direktur Nusantara Fiber dengan keempat perusahaan pengolahan yang terbesar di Indonesia, sebagaimana tercantum di daftar pemasoknya.⁵⁰ Sepertinya Royal Golden Eagle (Apical), yaitu perusahaan pengolahan terbesar ke-empat di Indonesia, melakukan pembelian dari setiap 27 perusahaan yang memiliki pabrik kelapa sawit dan/atau pabrik inti sawit. Musim Mas, Golden Agri-Resources dan Wilmar International melakukan pembelian masing-masing dari 12, 3 dan 2 perusahaan di antara ke-27 perusahaan tersebut.



PT Industrial Forest Plantation
January 2021
© Aidenvironment



Orangutan terancam punah di Kalimantan Tengah. Peta tumpang tindih konsesi PT IFP dengan distribusi lokasi orangutan
© Aidenvironment

PERUSAHAAN SAWIT YANG MEMILIKI PABRIK KELAPA SAWIT DAN/ATAU PABRIK INTI SAWIT	ROYAL GOLDEN EAGLE (APICAL) (2020 KUARTAL 3)	MUSIM MAS (2020 KUARTAL 3)	WILMAR INTERNATIONAL (JULI 2019 - JUNI 2020)	GOLDEN AGRI-RESOURCES (2020 KUARTAL 2)
Aditya Agroindo	Pembeli			
Anugerah Pelangi Sukses	Pembeli			
Archipelago Timur Abadi	Pembeli			
Asia Sawit Makmur Jaya	Pembeli	Pembeli		
Bina Mitra Makmur	Pembeli	Pembeli		
Bukit Sawit Semesta	Pembeli	Pembeli		
Bumi Mentari Karya	Pembeli	Pembeli	Pembeli	
Cahaya Cemerlang Lestari	Pembeli	Pembeli		
Dharmasraya Lestarindo	Pembeli			
Fortius Agro Asia	Pembeli	Pembeli		Pembeli
Gunung Sawit Abadi	Pembeli	Pembeli		
Hasil Karya Bumisejati	Pembeli			
Kalimantan Ria Sejahtera	Pembeli			
Karya Dewi Putra	Pembeli			
Karya Indorata Persada	Pembeli	Pembeli		Pembeli

Berlanjut pada halaman 36 ...

Tabel 3

Hubungan rantai pasokan perusahaan pengolahan minyak sawit besar di Indonesia dengan perusahaan kelapa sawit milik para direktur Nusantara Fiber

Sumber

Daftar pemasok Wilmar International (Juli 2019 - Juni 2020), Golden Agri-Resources (Kuartal 2, tahun 2020), Musim Mas (Juli - Sept 2020) dan Royal Golden Eagle (Apical, Kuartal 3, tahun 2020).

Berlanjut pada halaman 35 ...

PERUSAHAAN SAWIT YANG MEMILIKI PABRIK KELAPA SAWIT DAN/ATAU PABRIK INTI SAWIT	ROYAL GOLDEN EAGLE (APICAL) (2020 KUARTAL 3)	MUSIM MAS (2020 KUARTAL 3)	WILMAR INTERNATIONAL (JULI 2019 - JUNI 2020)	GOLDEN AGRI-RESOURCES (2020 KUARTAL 2)
Karyaindo Sejatitama	Pembeli	Pembeli		
Kemilau Indah Nusantara	Pembeli			
Merangkai Artha Nusantara	Pembeli	Pembeli		
Mitra Sawit Jambi	Pembeli			
Mutiara Sawit Semesta	Pembeli			
Perkebunan Pelalu Raya	Pembeli	Pembeli	Pembeli	
Permata Nusa Sejati	Pembeli			
Permata Subur Lestari	Pembeli			
Sabang Sawit Nusantara	Pembeli			Pembeli
Sinar Sawit Suburlestari	Pembeli	Pembeli		
Sumber Bunga Sawit Lestari	Pembeli			
Tayan Bukit Sawit	Pembeli			
TOTAL JUMLAH HUBUNGAN PEMBELI DI RANTAI PASOKAN	27	12	2	3

Tabel 3

Hubungan rantai pasokan perusahaan pengolahan minyak sawit besar di Indonesia dengan perusahaan kelapa sawit milik para direktur Nusantara Fiber

Sumber

Daftar pemasok Wilmar International (Juli 2019 - Juni 2020), Golden Agri-Resources (Kuartal 2, tahun 2020), Musim Mas (Juli - Sept 2020) dan Royal Golden Eagle (Apical, Kuartal 3, tahun 2020).



PT Industrial Forest Plantation
January 2021
© Aidenvironment

4

KOMITMEN KEBERLANJUTAN PELAKU USAHA UTAMA

Kebijakan NDPE perusahaan pengolahan terbesar di Indonesia

Kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi (No Deforestation, No Peat Development, and No Exploitation/NDPE) mencakup komitmen kepada hal-hal berikut: Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Free Prior Informed Consent/FPIC) untuk masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya; nol pembakaran; pencegahan kondisi kerja yang tidak layak; dan pelestarian areal Nilai Konservasi Tinggi (NKT), Stok Karbon Tinggi (SKT) dan lahan gambut.

Keempat perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit yang terbesar di Indonesia adalah Wilmar International, Musim Mas, Golden Agri-Resources (bagian dari grup perusahaan Sinar Mas) dan Apical (bagian dari grup perusahaan Royal Golden Eagle), yang secara bersama mencakup lebih dari 60 persen kapasitas pengolahan minyak kelapa sawit di Indonesia.⁵¹ Keempat perusahaan tersebut mempunyai kebijakan NDPE.⁵² Komitmennya berlaku untuk keseluruhan rantai pasok minyak kelapa sawitnya.

Selama beberapa tahun terakhir, kebijakan NDPE, tindakan pemerintah dan harga minyak sawit yang rendah ikut menyebabkan penurunan laju deforestasi untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit.⁵³ Namun, salah satu kelemahan dari kebijakan NDPE perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit adalah terbatas pada komoditas kelapa sawit saja. Setidaknya ada 40 grup perusahaan yang aktif di bidang usaha penanaman kelapa sawit dan hutan tanaman industri.⁵⁴ Ketika grup perusahaan tersebut melakukan deforestasi untuk kelapa sawit, maka perusahaan pengolahan minyak sawit akan menggunakan pengaruhnya untuk menuntut kepatuhan NDPE. Namun, ketika mitra usaha yang sama melakukan deforestasi untuk hutan tanaman industri, perusahaan pengolahan minyak sawit tidak menggunakan pengaruh yang sama untuk menuntut kepatuhan NDPE. Seandainya perusahaan pengolahan minyak sawit menerapkan kebijakan NDPE antar komoditas, maka mereka dapat menghentikan lebih banyak deforestasi.



Komitmen keberlanjutan di sektor hutan tanaman industri

Sebagian besar pemilik hutan tanaman di sektor HTI masih beroperasi tanpa kebijakan NDPE. Sektor terbesarnya, yakni pulp dan kertas, didominasi oleh Asia Pulp & Paper (APP) dan Asia Pacific Resources International Limited (APRIL). APP dan APRIL merupakan bagian masing-masing dari grup perusahaan Sinar Mas dan Royal Golden Eagle (RGE). Kedua grup perusahaan tersebut mempunyai komitmen keberlanjutan.

Grup perusahaan RGE mempunyai Kerangka Kerja Keberlanjutan Industri Kehutanan, Serat Kayu, Pulp & Kertas yang mengandung unsur yang pada umumnya ada dalam kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi (NDPE), dengan satu pengecualian penting karena tidak melarang pengembangan di lahan gambut non hutan. Kerangka kerja tersebut menyatakan “Tidak ada pembukaan lahan baru di hutan gambut.”⁵⁵ APRIL juga mempunyai kebijakan keberlanjutan yang disebut SFMP 2.0 yang diumumkan pada tanggal 3 Juni 2015.⁵⁶ Kebijakan tersebut kurang lebih sama dengan Kerangka Kerja Keberlanjutan Industri Kehutanan, Serat Kayu, Pulp & Kertas RGE.

Asia Pulp & Paper (APP) di grup perusahaan Sinar Mas mempunyai Kebijakan Konservasi Hutan sejak bulan Februari 2013 yang mengandung unsur biasa dari kebijakan NDPE, dengan pengecualian yang sama seperti kebijakan RGE karena tidak melarang pengembangan di lahan gambut. Kebijakan tersebut mengandung janji untuk “melindungi hutan gambut”.⁵⁷

Baik grup Sinar Mas maupun RGE diketahui menggunakan struktur perusahaan yang rumit dan kurang transparan, termasuk di sektor pulp dan kertas Indonesia.⁵⁸ Kerangka Kerja Keberlanjutan Industri Kehutanan, Serat Kayu, Pulp & Kertas RGE berlaku untuk perusahaan (dan pemasoknya) yang disebut oleh RGE sebagai bagian dari grup perusahaan RGE. Namun, terdapat berbagai perusahaan lain di sektor pulp dan kertas Indonesia yang dimiliki oleh entitas yang sama dengan RGE dan tidak diakui demikian oleh RGE. Lagipula, terdapat grup perusahaan yang berkaitan dengan grup perusahaan RGE, namun tidak diakui oleh RGE sebagai bagian dari grup perusahaan. Kebijakan RGE masih memberikan kesempatan bagi grup perusahaan yang berkaitan dengannya untuk melakukan deforestasi.

PT Industrial Forest Plantation

January 2021

© Aidenvironment

5

KEGIATAN PULP DAN KERTAS RGE DI INDONESIA

5.1

Hutan tanaman industri seluas 1,6 juta hektar

Pabrik pengolahan di Indonesia

Gambar di bawah ini memperlihatkan perusahaan-perusahaan yang dinyatakan oleh Royal Golden Eagle (RGE) sebagai bagian dari grup perusahaan RGE. RGE memproduksi pulp, kertas dan serat viscose rayon di Indonesia (APRIL dan APR), Tiongkok (Asia Symbol dan Sateri) dan Brasil (Bracell). APRIL adalah singkatan dari Asia Pacific Resources International Limited, sedangkan APR adalah singkatan dari Asia Pacific Rayon.⁵⁹ APRIL dan APR lebih banyak memiliki pabrik pengolahan daripada areal konsesi.



Grup perusahaan RGE

RGE mengelola sebuah grup perusahaan kelas dunia dengan spesialisasi manufaktur berbahan dasar sumber daya dan didukung oleh pekerja lebih dari 60.000 orang.



PT Industrial Forest Plantation
January 2021
© Aidenvironment

Gambar 10
Perusahaan di grup RGE menurut RGE

Sumber
Situs web RGE www.rgei.com (diakses pada tanggal 2 Januari 2021)

‘APRIL adalah perusahaan pembuat pulp dan kertas terbesar ke dua di Indonesia, mengoperasikan pabrik pulp dan kertas yang terintegrasi di Pangkalan Kerinci, provinsi Riau, Sumatra.’

APRIL adalah produsen pulp dan kertas terbesar kedua di Indonesia, yang mengoperasikan pabrik pulp dan kertas terpadu di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau, pulau Sumatra. Pabrik tersebut mampu memproduksi 2,8 juta ton pulp dan 1,15 juta ton kertas per tahun. Produk APRIL diekspor ke lebih dari 70 negara di seantero dunia.⁶⁰ APR memproduksi serat viscose rayon atau viscose staple fibre (VSF) dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 240.000 ton. Bahan baku yang diperlukan adalah pulp larut. APR membeli sebagian besar bahan baku pulp larutnya dari APRIL dan PT Toba Pulp Lestari. Serat viscose rayon umumnya digunakan di industri tekstil.⁶¹

PT Toba Pulp Lestari, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimiliki oleh entitas yang sama dengan RGE, padahal tidak diakui sebagai bagian dari grup perusahaan RGE sebagaimana didefinisikan oleh RGE sendiri. PT Toba Pulp Lestari memproduksi 168.000 ton pulp pada tahun 2019, terutama pulp larut. Seluruh hasil produksinya dijual kepada perusahaan-perusahaan RGE di bawah pengendalian yang sama dengan PT Toba Pulp Lestari.⁶²



PT Industrial Forest Plantation

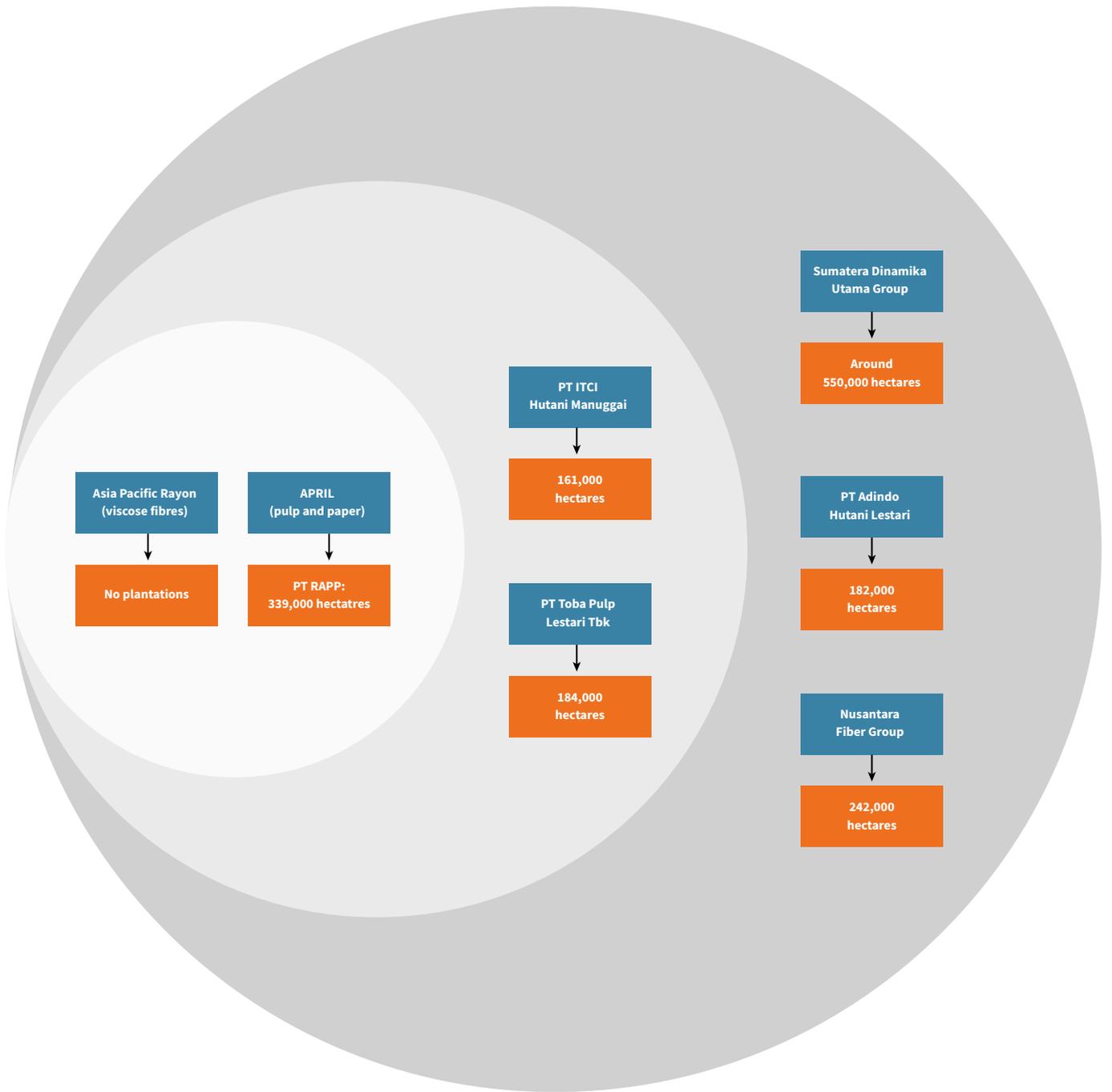
January 2021

© Aidenvironment

Areal konsesi seluas 1,6 juta hektar

APRIL dan APR dianggap oleh RGE sebagai bagian dari grup perusahaan RGE. Perusahaan HTI APRIL, yaitu PT Riau Andalan Pulp & Paper (PT RAPP), mempunyai areal konsesi seluas 339.000 hektar di Provinsi Riau, pulau Sumatra.⁶³ Sedangkan APR tidak memiliki areal konsesi. Grup perusahaan RGE yang diakui oleh RGE sendiri bertentangan dengan definisi grup korporat sebagaimana digambarkan dalam Kerangka Akuntabilitas yang ditetapkan baru-baru ini oleh LSM-LSM yang bergerak di bidang konservasi.⁶⁴ Beberapa perusahaan lain di sektor pulp dan kertas Indonesia, seperti PT Toba Pulp Lestari dengan areal konsesi seluas 184.000 hektar, dan PT ITCI Hutani Manunggal (161.000 hektar), dimiliki oleh entitas yang sama dengan RGE.⁶⁵

Selain itu, beberapa grup perusahaan berkaitan dengan grup perusahaan RGE, namun hubungan yang pasti dengan RGE sulit untuk ditentukan dikarenakan kurang transparannya RGE. Terdapat tiga grup perusahaan di kategori ini: grup Sumatera Dinamika Utama dengan areal konsesi seluas 550.000 hektar, PT Adindo Hutani Lestari (182.000 hektar) dan Nusantara Fiber Group (242.000 hektar). Secara keseluruhan terdapat 1,66 juta hektar hutan tanaman industri di Indonesia yang dimiliki atau berkaitan dengan RGE. Ini merupakan 15 persen dari total luas hutan tanaman industri (11,3 juta hektar) di Indonesia.⁶⁶



KUNCI

- Berkaitan dengan RGE
- Dimiliki oleh entitas yang sama dengan RGE
- RGE menurut RGE

Gambar 11

Hutan tanaman industri di Indonesia yang dimiliki atau berkaitan dengan RGE

Sumber

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Buku Geospasial 2019, KLHK, Januari 2020, bit.ly/35dBiWf, Akte notaris Indonesia, Dashboard Keberlanjutan APRIL, Sumber serat kayu APRIL per tanggal 31 Oktober 2020, bit.ly/36A3eUA.



Hubungan RGE dengan Nusantara Fiber Group

PT Industrial Forest Plantation

January 2021

© Aidenvironment

Dalam tanggapan singkatnya terhadap draf laporan yang dikirim untuk peninjauan, RGE menanggapi satu kalimat di ringkasan eksekutif draf laporan: “Catatan publik tentang entitas grup tertentu mengisyaratkan adanya hubungan erat antara Nusantara Fiber Group dan Royal Golden Eagle (RGE).” RGE menyatakan bahwa kalimat tersebut merupakan “tuduhan yang keliru” dan “tidak sesuai fakta”. Selain itu, RGE menyatakan “tidak mempunyai hubungan dengan keenam perusahaan yang disebut dalam laporan sebagai bagian dari Nusantara Fiber Group”.⁶⁷ Setelah tanggapan singkatnya, RGE dimohon untuk memberikan tanggapan yang lebih ekstensif. RGE tidak menanggapi permohonan tersebut.⁶⁸

Dalam tanggapannya, Argyle menambahkan bahwa “Perusahaan penerima investasi (perusahaan di bawah Nusantara Fiber Group) menjaga jarak ketika

melaksanakan usahanya dalam pasar yang kompetitif. Mereka akan memasokkan produknya kepada pembeli pihak ketiga manapun kalau masuk akal dari segi ekonomi untuk melakukan hal tersebut.”⁶⁹

Dalam laporan ini, Aidenvironment menyatakan bahwa Nusantara Fiber Group berkaitan (melalui berbagai cara) dengan Royal Golden Eagle (RGE), yaitu melalui:

- Hubungan bisnis ekstensif RGE dengan perusahaan kelapa sawit milik direktur dan mantan direktur Nusantara Fiber.
- Dua dari ketiga direktur yang mendirikan Nusantara Fiber Group pernah bekerja di RGE.
- Riwayat kepemilikan perusahaan-perusahaan Nusantara Fiber Group.

‘... perusahaan akan menyuplai produk mereka ke pembeli pihak ke tiga manapun yang akan mendatangkan keuntungan secara ekonomi.’

5.2

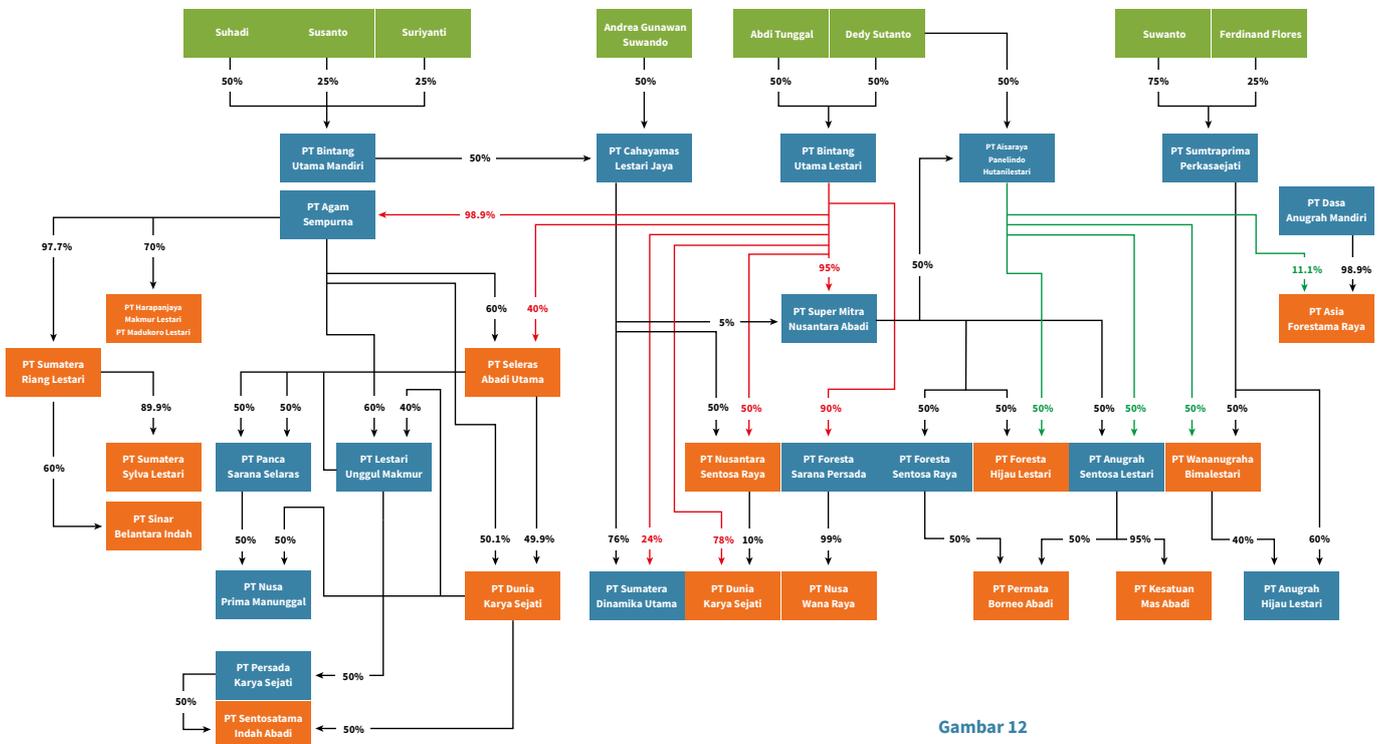
Deforestasi oleh PT Permata Borneo Abadi

Grup Sumatera Dinamika Utama

Grup Sumatera Dinamika Utama adalah pemasok terpenting bagi APRIL dan merupakan bagian dari pemasok serat kayu APRIL yang menjadi “mitra kerja jangka panjang”.⁷⁰ Secara keseluruhan “mitra kerja jangka panjang” tersebut mempunyai areal konsesi seluas 570.000 hektar,⁷¹ di mana sekitar 400.000 hektar (70 persen) dimiliki grup Sumatera Dinamika Utama.⁷² Grup perusahaan tersebut dimiliki oleh beberapa mantan karyawan RGE, dan di antara

perusahaan HTInya ada kesamaan direksi dan komisaris. Grup ini tidak mempunyai nama resmi maupun situs laman, namun pada akun media sosial dan iklan lowongan kerjanya grup ini disebut grup Sumatera Dinamika Utama.⁷³ APRIL tidak mengakui grup Sumatera Dinamika Utama sebagai grup perusahaan dalam daftar mitra pemasoknya, yang mengisyaratkan bahwa perusahaan HTI di grup Sumatera Dinamika Utama tidak menjadi subyek pengawasan

NDPE selagi belum menjadi pemasok APRIL. Total luas areal konsesi grup Sumatera Dinamika Utama mencapai sekitar 550.000 hektar.⁷⁴ PT Permata Borneo Abadi (49.000 hektar) adalah salah satu perusahaan HTI yang menjadi bagian dari grup Sumatera Dinamika Utama, tetapi belum menjadi pemasok APRIL. PT Permata Borneo Abadi melakukan deforestasi seluas 700 hektar sejak tahun 2016, di mana 500 hektar terjadi pada tahun 2020 sampai akhir bulan Oktober.⁷⁵



Gambar 12
Struktur perusahaan HTI di grup Sumatera Dinamika Utama

Sumber
Akte notaris Indonesia yang diperoleh tentang anak perusahaan dan perusahaan yang berkaitan dengan grup Sumatera Dinamika Utama, Oktober – Desember 2020

KUNCI

- Perusahaan induk
- Perusahaan perkebunan/tanaman
- Orang

Deforestasi

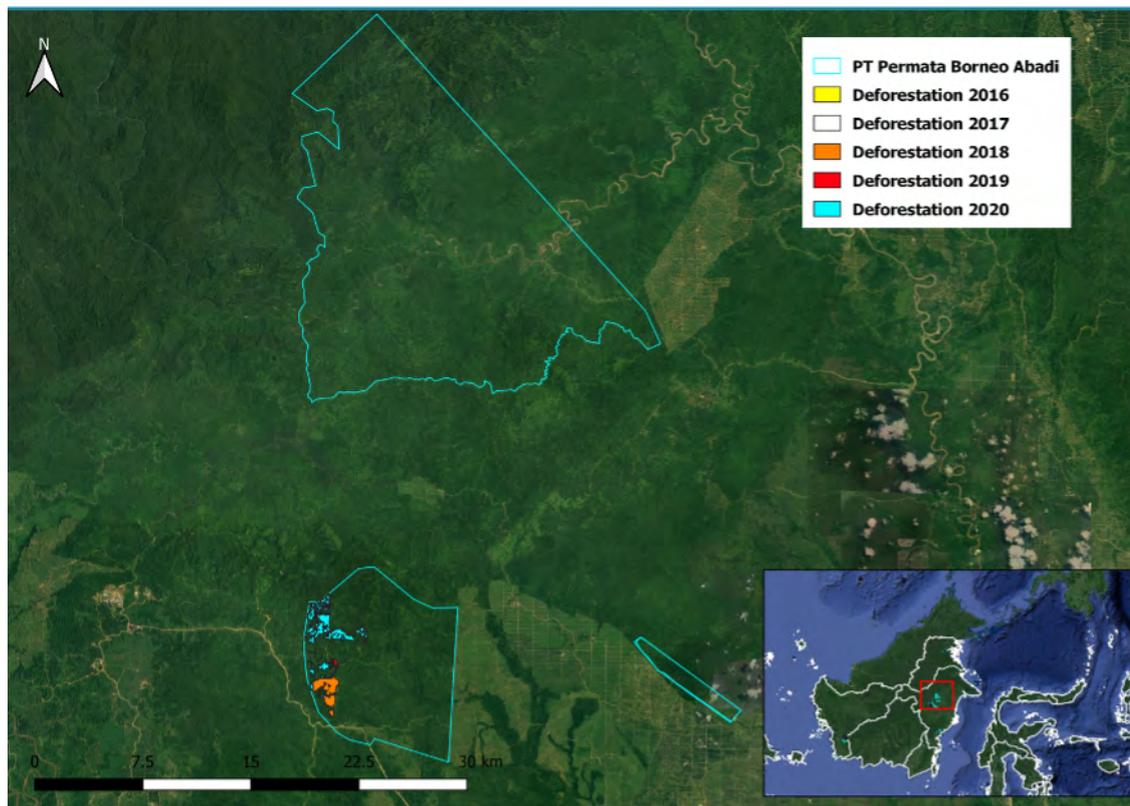
Anak perusahaan HTI Sumatera Dinamika Utama, PT Permata Borneo Abadi (PT PBA) yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai areal konsesi seluas 49.297 hektar.⁷⁶

PT PBA melakukan deforestasi seluas 700 hektar dari tahun 2016 sampai akhir bulan Oktober 2020. Sebagian besar deforestasi tersebut (500 hektar) terjadi pada tahun 2020.⁷⁷

Kawasan lindung dan klaim lahan

PT PBA mempunyai kawasan lindung seluas 11.090 hektar yang terdiri dari kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN) seluas 7.216 hektar, sepadan sungai seluas 3.753 hektar dan lereng curam seluas 121 hektar. Berdasarkan dokumen audit dari bulan November 2020, terdapat gangguan di kawasan lindung seperti perburuan dan pembalakan liar. Spesies orang utan (*Pongo pygmaeus*) yang terancam kritis masih bisa ditemukan di areal Nilai Konservasi Tinggi.

Dokumen audit dari badan sertifikasi tersebut juga mengidentifikasi klaim lahan oleh masyarakat di dalam areal konsesi dalam bentuk 9 kasus atas total lahan seluas 4.500 hektar pada akhir tahun 2019.⁷⁸



Gambar 13

Deforestasi oleh anak perusahaan Sumatera Dinamika Utama, PT Permata Borneo Abadi

Sumber

Google Maps, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Peta Tutupan Lahan 2016

5.3

Deforestasi oleh PT Adindo Hutani Lestari

‘Namun, Adindo tidak merespon secara detail terhadap kaitan antara PT AHL dan RGE yang diidentifikasi oleh LSM.’

PERUSAHAAN HTI bernama PT Adindo Hutani Lestari (Adindo) mempunyai areal konsesi seluas 182.000 hektar dan merupakan “pemasok pasar terbuka” untuk APRIL.⁷⁹ Enam puluh persen saham di perusahaan tersebut dimiliki oleh PT Kreasi Lestari Pratama, sedangkan 40% saham dimiliki oleh PT Anugrah Hijau Lestari, yaitu bagian dari grup Sumatera Dinamika Utama. Dalam tanggapannya pada bulan September 2020 terhadap pertanyaan dari Koalisi Anti Mafia Hutan (sebuah koalisi gabungan beberapa LSM Indonesia), Adindo menyatakan bahwa kedua pemegang sahamnya tidak terafiliasi dengan RGE. Namun, Adindo tidak menyampaikan pernyataan yang mendetail tentang hubungan antara PT AHL dan RGE yang teridentifikasi oleh kelompok LSM tersebut. Sebagai contoh, kelompok LSM menyatakan bahwa para komisaris, direktur dan pemegang saham di struktur kepemilikan PT Adindo saat ini (Protasius Daritan, Hartanto Wisastra, Dedy Sutanto dan Ferdinand Flores) mempunyai hubungan dengan RGE, APRIL dan/atau perusahaan yang berkaitan dengan RGE. Adindo hanya menyatakan bahwa keempat orang tersebut belum pernah menjabat sebagai komisaris, direktur maupun pemegang saham di Adindo, namun tidak menyinggung perusahaan-perusahaan yang memiliki Adindo.⁸⁰

Pada bulan Oktober 2020, koalisi LSM menerbitkan laporan tentang deforestasi yang dilakukan oleh Adindo. Koalisi LSM tersebut telah mendeteksi deforestasi seluas 7.291 hektar selama periode bulan Juni 2015 sampai Agustus 2020. Tanggapan APRIL dimasukkan dalam laporan tersebut. Menurut APRIL, tidak terjadi pelanggaran terhadap komitmen keberlanjutannya. Dalam tanggapannya, APRIL menyikapi tuduhan LSM tentang pembukaan areal Nilai Konservasi Tinggi dan kawasan hutan bergambut, namun tidak menanggapi angka deforestasi yang disajikan oleh kelompok LSM. Kebijakan keberlanjutan APRIL menyatakan dengan jelas bahwa APRIL hanya akan mengembangkan wilayah yang tidak berhutan, sesuai hasil identifikasi melalui penilaian Stok Karbon Tinggi (SKT) yang ditinjau oleh pihak independen. Koalisi LSM melaporkan bahwa sepengetahuan mereka, penilaian SKT belum pernah dilakukan untuk areal konsesi Adindo.⁸¹

5.4

Mantan pemilik areal konsesi Nusantara Fiber

UNTUK keenam perusahaan HTI Nusantara Fiber, akte notaris yang dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2017 menunjukkan bahwa perusahaan PT Borneo Hijau Lestari merupakan pemilik 70% saham di perusahaan tersebut, sementara perusahaan PT Borneo Foresta Industri mengakuisisi 30% saham lainnya. Sebelum tanggal tersebut, PT Borneo Hijau Lestari dan PT Borneo Foresta Industri belum memiliki saham di keenam perusahaan HTI. Dalam akte notaris yang dikeluarkan pada tanggal 13 September 2018, kepemilikan PT Borneo Foresta Industri atas keenam perusahaan HTI Nusantara Fiber meningkat sampai tingkat yang digambarkan pada Gambar 2 (Struktur perusahaan Nusantara Fiber Group) di bagian awal laporan ini.⁸²

Perusahaan PT Kreasi Lestari Pratama menjadi pemilik saham mayoritas di lima dari keenam perusahaan HTI tersebut, sesaat sebelum PT Borneo Hijau Lestari menjadi pemilik saham mayoritas. Sebagian besar saham di perusahaan HTI yang ke-enam, yaitu PT Nusantara Kalimantan Lestari, dimiliki oleh PT Asiaraya Panelindo Hutanilestari (PT APH) sebelum dipindahkan kepada PT Borneo Hijau Lestari. PT APH merupakan bagian dari grup Sumatera Dinamika Utama.

Akte notaris dari tahun ke tahun untuk PT Kreasi Lestari Pratama memperlihatkan riwayat kepemilikan sebagai berikut:

- Selama periode tahun 1997 sampai bulan Oktober 2003, PT Kreasi Lestari Pratama (PT Kreasi) dimiliki oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei. Sukanto Tanoto adalah pendiri grup perusahaan RGE sedangkan Tinah Bingei adalah isterinya.⁸³
- Selama periode bulan November 2003 sampai Agustus 2008, pemilik saham mayoritas di PT Kreasi adalah PT Firdaus Mitra Utama (PT FMU). Setidaknya sampai tanggal 10 Mei 2007, mayoritas saham di PT FMU dimiliki oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei. Pada tanggal 11 Mei 2007, PT Indograha Mandiri (PT IM, alamat Jalan Teluk Betung Nomor 31) menjadi pemilik saham mayoritas. Sayangnya, rincian kepemilikan PT IM untuk periode bulan Mei 2007 sampai Agustus 2008 tidak tersedia di sistem administrasi badan usaha Indonesia.⁸⁴
- Selama periode bulan September 2008 sampai September 2012, PT Gemilang Bangun Sejati (PT GBS)

menjadi pemilik saham mayoritas di PT Kreasi, sementara sebagian besar saham di PT GBS sendiri dimiliki oleh Montpelier International Group Limited, yang terdaftar di British Virgin Islands.⁸⁵ Berdasarkan basis data Offshore Leaks, Montpelier adalah perusahaan perantara dari RGM International Pte Ltd, yaitu nama lama RGE. Oleh karena informasi yang terdapat di basis data ICIJ berlaku pada tahun 2010, maka kepemilikan perusahaan tersebut barangkali sudah berubah.⁸⁶

- Pada tanggal 20 Januari 2015, saham dipindahkan dari perusahaan PT Garuda Bangun Sejati kepada perusahaan Pacific Fiber Limited yang terdaftar di wilayah yurisdiksi kerahasiaan perusahaan, British Virgin Islands.
- Pada tanggal 21 November 2019, perusahaan East Globe Logistic Corp (terdaftar di British Virgin Islands) menjadi pemilik saham mayoritas, sedangkan Pacific Fiber Limited mempertahankan 18 persen saham.

‘... akta notaris tertanggal 24 Januari 2017 menunjukkan bahwa PT Borneo Hijau Lestari menjadi 70% pemilik dari perusahaan perkebunan/tanaman industri.’

TANGGAL AKTE NOTARIS	JUMLAH SAHAM					
	PT FIRDAUS MITRA UTAMA	EAST GLOBE LOGISTIC CORP, BVI	PACIFIC FIBER LIMITED, BVI	PT GEMILANG BANGUN SEJATI	SUKANTO TANOTO + TINAH BINGEI	TOTAL
06 Feb 1997					2,500	2,500
31 Okt 2003	25			2		27
11 Agu 2008	25			62,725		62,750
20 Jan 2015	25		62,725			62,750
21 Nov 2019	25	278,100	62,725			340,850

Tabel 4

Pemegang saham PT Kreasi Lestari Pratama dari tahun ke tahun

Sumber

Serangkaian akte notaris dari tahun ke tahun untuk PT Kreasi Lestari Pratama, sebagaimana diperoleh pada tanggal 4 Desember 2020

Referensi

- 1 Dewan Uni Eropa, siaran pers, Daftar UE mengenai wilayah yurisdiksi yang tidak kooperatif untuk urusan perpajakan: Anguilla dan Barbados ditambahkan, Kepulauan Cayman dan Oman dikeluarkan, 6 Oktober 2020, bit.ly/2Udr4hK.
- 2 Tanggapan dari perwakilan Argyle Street Management, Mr. Kin Chan dan Mr. Peter Peh, terhadap draf laporan yang dikirim untuk peninjauan, tanggal 4, 6 dan 9 Februari 2021. Tanggapan dari perwakilan Royal Golden Eagle group, Mr. Ignatius Ari Djoko Purnomo, terhadap draf laporan yang dikirim untuk peninjauan, tanggal 2 Februari 2021.
- 3 Tanggapan dari perwakilan Argyle Street Management, Mr. Kin Chan dan Mr. Peter Peh, terhadap draf laporan yang dikirim untuk peninjauan, tanggal 4, 6 dan 9 Februari 2021.
- 4 Formulir pendaftaran Green Meadows Fiber Products Limited, 23 November 2015.
- 5 Surat Apical kepada Aidenvironment, 23 Januari 2017.
- 6 Profil registri perusahaan untuk Acapalm Plantation Services Sdn Bhd, berlaku per tanggal 6 Oktober 2020 dan 15 Agustus 2018.
- 7 Daftar Anggota Institut Singapura untuk Ahli Pajak Terakreditasi, bit.ly/3pqi4UZ (diakses pada tanggal 13 November 2020). Relation shipscience, Sia Siew Kiang, bit.ly/3pkzH8J (diakses pada tanggal 13 November 2020).
- 8 Tanggapan dari perwakilan Argyle Street Management, Mr. Kin Chan dan Mr. Peter Peh, terhadap draf laporan yang dikirim untuk peninjauan, tanggal 4, 6 dan 9 Februari 2021.
- 9 Argyle Street Management Limited, situs web, bit.ly/3flPRtQ (diakses pada tanggal 10 November 2020). Komisi Sekuritas dan Kontrak Berjangka Hong Kong, Daftar umum pihak berlisensi dan badan terdaftar, PEH Pit Tat, bit.ly/3nb0ORH (diakses pada tanggal 10 November 2020).
- 10 LinkedIn, Kata pencarian "Nusantara Fiber", bit.ly/3mTjNzw (diakses pada tanggal 27 Desember 2020). Instagram, Kantor Nusantara Fiber, Balikpapan Baru, Indonesia, bit.ly/3nV5wnm (diakses pada tanggal 27 Desember 2020). Detak Indonesia, 200 Pekerja Kontraktor Landclearing Tagih Gaji di PT SMA Pekanbaru, 22 Juni 2020, bit.ly/2JIXsx1. ProKaltim, PT SBA dan PT MPS Gelar Konsultasi Publik, 25 Maret 2016, bit.ly/3aP4WnD.
- 11 Global Forest Watch, Peta Hutan Dunia Interaktif & Data Perubahan Tutupan Pohon, Tutupan pohon yang hilang 2016-2019 (kepada datan kanopi >75%), bit.ly/33ABihx.
- 12 Tanggapan dari perwakilan Argyle Street Management, Mr. Kin Chan dan Mr. Peter Peh, terhadap draf laporan yang dikirim untuk peninjauan, tanggal 4, 6 dan 9 Februari 2021.
- 13 Sertifikasi Trustindo, Riwayat PHPL (pengelolaan hutan produksi lestari) penilaian kinerja, PT Industrial Forest Plantation, 24 Juni 2019, bit.ly/338FAfz.
- 14 IUCN/Grup Ahli Pembiakan Konservasi SSC (rapat pada bulan Mei 2016), Penilaian Kelayakan Populasi dan Habitat Orang Utan: Laporan Akhir, 2017, bit.ly/3nD1ejK.
- 15 Daftar Merah Spesies Terancam IUCN 2016, Ancrenaz, M., Gumal, M., Marshall, A.J., Meijaard, E., Wich, S.A. dan Husson, S., *Pongo pygmaeus ssp. wurmbii*, 2016, bit.ly/2K2degR dan bit.ly/2XBkfs4
- 16 Sertifikasi Trustindo, Riwayat PHPL (pengelolaan hutan produksi lestari) penilaian kinerja, PT Industrial Forest Plantation, 17 Juli 2020, bit.ly/3b8VLyr. Sertifikasi Trustindo, Riwayat PHPL (pengelolaan hutan produksi lestari) penilaian kinerja, PT Industrial Forest Plantation, 24 Juni 2019, bit.ly/338FAfz.
- 17 Sertifikasi Trustindo, Riwayat PHPL (pengelolaan hutan produksi lestari) penilaian kinerja, PT Industrial Forest Plantation, 17 Juli 2020, bit.ly/3b8VLyr.
- 18 Hal ini dilakukan secara visual dengan melalui pengidentifikasian kegiatan pertambangan di citra satelit terbaru dengan cara menumpangtindihkan areal konsesi dengan peta konsesi tambang.
- 19 Sertifikasi Trustindo, Riwayat PHPL (pengelolaan hutan produksi lestari) penilaian kinerja, PT Santan Borneo Abadi, 14 Desember 2019, bit.ly/2J77RvU. Sertifikasi Trustindo, Riwayat PHPL (pengelolaan hutan produksi lestari) penilaian kinerja, PT Santan Borneo Abadi, 10 Desember 2020, bit.ly/3b8W64b.
- 20 Sertifikasi Trustindo, Riwayat PHPL (pengelolaan hutan produksi lestari) penilaian kinerja, PT Santan Borneo Abadi, 10 Desember 2020, bit.ly/3b8W64b.
- 21 Sertifikasi Trustindo, Riwayat PHPL (pengelolaan hutan produksi lestari) penilaian kinerja, PT Mahakam Persada Sakti, 4 Januari 2020, bit.ly/38e9VMI.

- 22 Sertifikasi Trustindo, Riwayat PHPL (pengelolaan hutan produksi lestari) penilaian kinerja, PT Mahakam Persada Sakti, 4 Januari 2020, bit.ly/38e9VMI.
- 23 Sertifikasi Trustindo, Riwayat PHPL (pengelolaan hutan produksi lestari) penilaian kinerja, PT Mahakam Persada Sakti, 12 Januari 2019, bit.ly/3m0bhPQ. Sertifikasi Trustindo, Riwayat PHPL (pengelolaan hutan produksi lestari) penilaian kinerja, PT Mahakam Persada Sakti, 4 Januari 2020, bit.ly/38e9VMI.
- 24 Sertifikasi Trustindo, Riwayat PHPL (pengelolaan hutan produksi lestari) penilaian kinerja, PT Mahakam Persada Sakti, 4 Januari 2020, bit.ly/38e9VMI.
- 25 Sertifikasi Trustindo, Riwayat PHPL (pengelolaan hutan produksi lestari) penilaian kinerja, PT Bakayan Jaya Abadi, 31 Maret 2020, bit.ly/3q0aKzJ.
- 26 Sertifikasi Trustindo, Riwayat PHPL (pengelolaan hutan produksi lestari) penilaian kinerja, PT Bakayan Jaya Abadi, 31 Maret 2020, bit.ly/3q0aKzJ.
- 27 Sertifikasi Trustindo, Riwayat PHPL (pengelolaan hutan produksi lestari) penilaian kinerja, PT Permata Hijau Khatulistiwa, 18 Maret 2019, bit.ly/3nW2kHR. Sertifikasi Trustindo, Riwayat PHPL (pengelolaan hutan produksi lestari) penilaian kinerja, PT Permata Hijau Khatulistiwa, 30 Maret 2020, bit.ly/3ognCR3.
- 28 Sertifikasi Trustindo, Riwayat PHPL (pengelolaan hutan produksi lestari) penilaian kinerja, PT Permata Hijau Khatulistiwa, 18 Maret 2019, bit.ly/3nW2kHR. Sertifikasi Trustindo, Riwayat PHPL (pengelolaan hutan produksi lestari) penilaian kinerja, PT Permata Hijau Khatulistiwa, 30 Maret 2020, bit.ly/3ognCR3.
- 29 Peta konsesi kelapa sawit dan daftar pabrik global Aidenvironment.
- 30 Profil registri perusahaan untuk Acapalm Plantation Services Sdn Bhd, berlaku per tanggal 6 Oktober 2020 dan 15 Agustus 2018.
- 31 E-mail dari Peter Peh (Argyle Street Management Limited) kepada Aidenvironment, 11 April 2017.
- 32 Tanggapan dari perwakilan Argyle Street Management, Mr. Kin Chan dan Mr. Peter Peh, terhadap draf laporan yang dikirim untuk peninjauan, tanggal 4, 6 dan 9 Februari 2021.
- 33 Malaysian Reinsurance Berhad, Direktori Asuransi Malaysia 2020/2021, halaman 190, bit.ly/38qSglD
- 34 Surat dari Apical kepada Aidenvironment, 23 Januari 2017.
- 35 Berkas registri perusahaan untuk PT Lahan Agro Inti Ketapang (per tanggal 10 Agustus 2018) dan Meadows Capital Sdn Bhd (per tanggal 13 September 2018). Wilmar, Daftar Pengaduan Wilmar, Lahan Agro Inti Ketapang (LAIK), anak perusahaan DTK Opportunity, bit.ly/3ljm3QL. Apical Group, Keberlanjutan, Pengaduan, DTK Opportunity, bit.ly/2GOx4KV.
- 36 Argyle Street Management Limited, situs web, bit.ly/3flPRtQ (diakses pada tanggal 10 November 2020). Komisi Sekuritas dan Kontrak Berjangka Hong Kong, Daftar umum pihak berlisensi dan badan terdaftar, PEH Pit Tat, bit.ly/3nb0ORH (diakses pada tanggal 10 November 2020).
- 37 United Fiber System Limited, Pengumuman kepada SGX, Lampiran 1, Pimpinan lama dan saat ini, Mr. Chan Kin, 20 April 2015, bit.ly/35fzFH9. Argyle Street Management Limited, Mr. Chan, <http://bit.ly/2jUJGiX>.
- 38 Otoritas Moneter Kepulauan Cayman, Daftar Dana Reksa per tanggal 30-06-2020, bit.ly/3ljeDgn (diakses pada tanggal 10 November 2020). AUM 13F - AUM Metrics Analysis, Dana DTK Opportunity – Informasi dan Direksi Dana, bit.ly/3pcvUp.
- 39 Komisi Sekuritas dan Kontrak Berjangka Hong Kong, Daftar umum pihak berlisensi dan badan terdaftar, Perusahaan: Argyle Street Management Limited, bit.ly/3ksvFhw (diakses pada tanggal 13 November 2020). Berkas registri perusahaan Hong Kong untuk PAL Holdings Limited, ASB Investment Limited, GBS Holdings Limited dan PLM Investment Limited, berlaku per 26-06-2020.
- 40 Tanggapan dari perwakilan Argyle Street Management, Mr. Kin Chan dan Mr. Peter Peh, terhadap draf laporan yang dikirim untuk peninjauan, tanggal 4, 6 dan 9 Februari 2021.
- 41 United Fiber System Limited, Pengumuman kepada SGX, Lampiran 1, Pimpinan lama dan saat ini, Mr. Peh Pit Tat, 20 April 2015, bit.ly/2Il2pWs. LinkedIn, Peter Pit Tat Peh, bit.ly/3kIOeNE.
- 42 Berkas registri perusahaan Hong Kong untuk Sunny Vision Group Limited (berlaku per 29 Juli 2020) dan Green Meadows Fiber Products Limited (berlaku per 27 November untuk tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020).
- 43 Berkas registri perusahaan Hong Kong untuk Sunny Vision Group Limited (berlaku per 30 Juli 2018 dan 29 Juli 2020) dan Green Meadows Fiber Products Limited (berlaku per 27 November 2019 dan 27 November 2020).
- 44 Pemerintah Hong Kong, Pusat Pencarian Cyber dari Sistem Informasi Registri Perusahaan Terpadu (Integrated Companies Registry Information System (ICRIS)), Pemberitahuan perubahan sekretaris dan direktur perusahaan (penunjukan/penghentian), BUP Investment Limited, 3 Juni 2020. Komisi Sekuritas dan Kontrak Berjangka Hong Kong, Daftar umum pihak berlisensi dan badan terdaftar, Perusahaan: Argyle Street Management Limited, perwakilan: LIU Wui Hang, bit.ly/3ksvFhw (diakses pada tanggal 11 November 2020).

- 45 Profil registri perusahaan untuk Asagro Sdn Bhd, diperoleh pada tanggal 5 Mei 2017, 29 November 2019 dan 10 November 2020.
- 46 Basis data Offshore Leaks oleh The International Consortium of Investigative Journalists, Brighton Investment Group Ltd, bit.ly/2GT DgRM (diakses pada tanggal 11 November 2020).
- 47 Basis data Offshore Leaks oleh The International Consortium of Investigative Journalists, Powerpoint Investments Limited, bit.ly/3eVWkeP (diakses pada tanggal 11 November 2020).
- 48 APRIL, siaran pers, Cabang Shandong APRIL menggalang RMB 7,5 miliar untuk membangun jalur pulp dan kertas terbesar di Tiongkok, 12 Januari 2009, bit.ly/2UITeY1.
- 49 Chain Reaction Research, Kebijakan NDPE Mencakup 83% Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit; Sedangkan Pelaksanaannya Mencapai 78%, 2 Juni 2020, bit.ly/38XvjGM. Dihitung dari data yang digunakan untuk laporan.
- 50 Wilmar International, peta rantai pasokan, pasokan dari Juli 2019 - Juni 2020, bit.ly/2IVLHgg. Golden Agri-Resources, peta rantai pasokan, Kuartal 2, tahun 2020, bit.ly/35K4tzQ. Musim Mas, Keterlacakan, Juli - Sept 2020, bit.ly/3nQFYy. Royal Golden Eagle (Apical), Keterlacakan, Kuartal 3, tahun 2020, bit.ly/3pTlJei (diakses pada tanggal 19 November 2020).
- 51 Chain Reaction Research, Kebijakan NDPE Mencakup 83% Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit; Sedangkan Pelaksanaannya Mencapai 78%, 2 Juni 2020, bit.ly/38XvjGM. Dihitung dari data yang digunakan untuk laporan.
- 52 Wilmar International, kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi, 5 Desember 2013, bit.ly/3qAZcTW. Musim Mas, Kebijakan Keberlanjutan, Agustus 2017, bit.ly/3grCcSv. Golden Agri-Resources, kebijakan sosial dan lingkungan hidup GAR, 1 Oktober 2015, bit.ly/37GfsKG. Apical, Kebijakan Keberlanjutan (September 2014) dan Kebijakan Pembelian Minyak Kelapa Sawit (12 Oktober 2015), bit.ly/3ghY7eW.
- 53 Chain Reaction Research, Kebijakan NDPE Mencakup 83% Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit; Sedangkan Pelaksanaannya Mencapai 78%, 2 Juni 2020, bit.ly/38XvjGM.
- 54 Contoh adalah: ADR Group, Buana Sriwijaya Sejahtera (BSS) Group, Citra Borneo Indah (SSMS), Dharma Satya Nusantara, Djarum, Environ Resources Limited, Erik & Akie Setiawan (Esse Agritama), keluarga Fangiono, GPS Group (Gagah Putera Satria), keluarga Gunawan (Incasi Raya), Hardaya, Harita Group (Bumitama), Harum Agro, Jawa Pos Group, Jhonlin, Kayan Patria Pratama (KPP) Group, Kayu Lapis Indonesia, Korindo, KPN Corp - Katingan Timber Group (KTG), KTS/BLD, Kurnia Luwuk Sejati, Lyman Group, Makin Group, Medco, Mujur Group, Panca Eka, Prajogo Pangestu/Barito Pacific, Rimbunan Hijau, Royal Golden Eagle (Asian Agri/Apical/Anugrah Superventure), Salim Group, Sampoerna, Sentosa Bahagia Bersama, Sime Darby Plantation, Sinar Mas (Golden Agri-Resources), Sungai Budi (Tunas Baru Lampung), Torganda, Tradewinds Plantation, United Malacca dan perusahaan kelapa sawit milik para direktur Nusantara Fiber.
- 55 Royal Golden Eagle (RGE), Kerangka Keberlanjutan Hutan, Serat, Pulp dan Kertas, diupdate terakhir kali pada tanggal 9 Oktober 2017, bit.ly/2JzbHy6.
- 56 Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan APRIL 2.0, 3 Juni 2015, bit.ly/3mv3XvA.
- 57 APP, Kebijakan Konservasi Hutan APP, Februari 2013, bit.ly/3mSKc0L.
- 58 Misalnya lihat laporan berikut ini: Koalisi Anti Mafia Hutan dkk., Tapi, Buka Dulu Topengmu, penilaian struktur kepemilikan dan manajemen perusahaan pemasok kayu di Indonesia yang diumumkan oleh Asia Pulp & Paper, 30 Mei 2018, bit.ly/2KT11hn. Koalisi Anti Mafia Hutan dkk., Membabat Hutan Tanpa Henti: Hubungan dengan Adindo Hutani Lestari Mencederai Komitmen Tanpa Deforestasi APRIL Grup, 6 Oktober 2020, bit.ly/3o8Ta16.
- 59 Royal Golden Eagle, RGE sebagai perusahaan, bit.ly/36xo9HT (diakses pada tanggal 2 Desember 2020).
- 60 APRIL, Sustainability report 2019, 19 Juli 2020, bit.ly/3pFlnWs.
- 61 Asia Pacific Rayon (APR), Laporan Keberlanjutan Januari 2019 - Juni 2020, November 2020, bit.ly/3rMK6Lx. Asia Pacific Rayon (APR), Dashboard Keberlanjutan, Rantai Pasokan, bit.ly/389q5qG (diakses pada tanggal 2 Januari 2021)
- 62 PT Toba Pulp Lestari, Laporan Tahunan 2019, Juni 2020, bit.ly/3b1L5Br
- 63 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Buku Geospasial 2019, KLHK, Januari 2020, bit.ly/35dBiWf.
- 64 Inisiatif Kerangka Akuntabilitas, Istilah dan Definisi, Juni 2019 (revisi kecil: Mei 2020), bit.ly/2VspmtK (diakses pada tanggal 2 Desember 2020).
- 65 PT Toba Pulp Lestari Tbk, Laporan Tahunan 2019, Transaksi dengan pihak yang berkaitan, halaman 198, bit.ly/2Vtoyo7. Majalah Tempo, Hutan Tanoto di Ibu Kota, 17 September 2019, bit.ly/2WhlEb (perlu di-subscribe).
- 66 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Buku Geospasial 2019, KLHK, Januari 2020, bit.ly/35dBiWf.
- 67 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Buku Geospasial 2019, KLHK, Januari 2020, bit.ly/35dBiWf.
- 67 Tanggapan oleh perwakilan Royal Golden Eagle group, Mr. Ignatius Ari Djoko Purnomo, terhadap draf laporan yang dikirim untuk peninjauan, 2 Februari 2021.
- 68 Email dari Aidenvironment kepada Mr. Ignatius Ari Djoko Purnomo, 8 Februari 2021.

- 69 Tanggapan oleh perwakilan Argyle Street Management, Mr. Kin Chan dan Mr. Peter Peh, terhadap draf laporan yang dikirim untuk peninjauan, tanggal 4, 6 dan 9 Februari 2021.
- 70 Dashboard keberlanjutan APRIL, Peta Interaktif, Sumber serat kayu APRIL per tanggal 31 Oktober 2020, bit.ly/36A3eUA
- 71 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Buku Geospasial 2019, KLHK, Januari 2020, bit.ly/35dBiWf.
- 72 Pemasok APRIL dan bagian dari grup Sumatera Dinamika Utama: PT Sumatera Riang Lestari, PT Sumatera Sylva Lestari, PT Bukit Raya Mudisa, PT Harapanjaya Makmur Lestari, PT Madukoro Lestari, PT Nusa Wana Raya, PT Nusantara Sentosa Raya, PT Selaras Abadi Utama, PT Sinar Belantara Indah, PT Wananugraha Bimalestari, CV Alam Lestari, CV Bhakti Praja Mulia, CV Mutiara Lestari, CV Putri Lindung Bulan dan CV Tuah Negeri. Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Buku Geospasial 2019, KLHK, Januari 2020, bit.ly/35dBiWf. Akte notaris Indonesia. Dashboard keberlanjutan APRIL, Peta Interaktif, Sumber serat kayu APRIL per tanggal 31 Oktober 2020, bit.ly/36A3eUA.
- 73 Jobstreet, PT Sumatera Dinamika Utama, bit.ly/3mGw9M9 (diakses pada tanggal 3 Desember 2020).
Relasio.com, PT Sumatera Dinamika Utama, bit.ly/33JgLHz (diakses pada tanggal 3 Desember 2020).
LinkedIn, kata pencarian Sumatera Dinamika Utama, bit.ly/37xV6TJ (diakses pada tanggal 3 Desember 2020).
- 74 Juga sebagai bagian dari grup Sumatera Dinamika Utama, tapi belum menjadi pemasok APRIL: PT Kesatuan Mas Abadi (100.000 hektar) dan PT Permata Borneo Abadi (49.000 hektar). Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Buku Geospasial 2019, KLHK, Januari 2020, bit.ly/35dBiWf. Akte notaris Indonesia. Dashboard keberlanjutan APRIL, Peta Interaktif, Sumber serat kayu APRIL per tanggal 31 Oktober 2020, bit.ly/36A3eUA.
- 75 Planet.com, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Peta Tutupan Lahan 2016.
- 76 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Buku Geospasial 2019, KLHK, Januari 2020, bit.ly/35dBiWf.
- 77 Planet.com, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Peta Tutupan Lahan 2016.
- 78 Sertifikasi Trustindo, Riwayat PHPL (pengelolaan hutan produksi lestari) penilaian kinerja, PT Permata Borneo Abadi, 9 November 2020, bit.ly/2Lo36PC.
- 79 Dashboard Keberlanjutan APRIL, Peta Interaktif, Sumber serat kayu APRIL per tanggal 31 Oktober 2020, bit.ly/36A3eUA.
- 80 PT Adindo Hutani Lestari, surat kepada PT Riau Andalan Pulp & Paper perihal draf-laporan Koalisi Anti Mafia Hutan, tertanggal 30 September 2020. Sebagaimana diterbitkan dalam laporan: Koalisi Anti Mafia Hutan dkk., Membabat Hutan Tanpa Henti: Hubungan dengan Adindo Hutani Lestari Mencederai Komitmen Tanpa Deforestasi APRIL Grup, 6 Oktober 2020, bit.ly/3o8TaI6.
- 81 Koalisi Anti Mafia Hutan dkk., Membabat Hutan Tanpa Henti: Hubungan dengan Adindo Hutani Lestari Mencederai Komitmen Tanpa Deforestasi APRIL Grup, 6 Oktober 2020, bit.ly/3o8TaI6.
- 82 Akte notaris Indonesia yang diperoleh untuk anak perusahaan dan perusahaan yang berkaitan dengan Nusantara Fiber Group (termasuk mantan pemilik), Oktober - Desember 2020.
- 83 Serangkaian akte notaris dari tahun ke tahun untuk PT Kreasi Lestari Pratama, sebagaimana diperoleh pada tanggal 4 Desember 2020. Tanoto Foundation, Jajaran Pimpinan, bit.ly/35mFIP5 (diakses pada tanggal 8 Januari 2020).
- 84 Versi akte notaris Indonesia yang (seharusnya) juga mengungkapkan identitas mantan pemilik, diperoleh untuk PT Firdaus Mitra Utama dan PT Indograha Mandiri.
- 85 Versi akte notaris Indonesia yang juga mengungkapkan mantan pemilik, diperoleh untuk PT Gemilang Bangun Sejati pada tanggal 16 Januari 2017. Akte notaris untuk PT Kreasi menyatakan kepemilikan oleh perusahaan PT Garuda Bangun Sejati Irian Jaya dan PT Garuda Bangun Sejati, padahal perusahaan tersebut telah ganti nama menjadi PT Gemilang Bangun Sejati. Alamat domisili PT Garuda Bangun Sejati Irian Jaya dan PT Garuda Bangun Sejati yang dinyatakan secara konsisten dalam akte notaris adalah Jalan Teluk Betung Nomor 31, yaitu alamat yang terdapat di halaman Hubungi Kami di situs web APRIL. Sumber: APRIL, Hubungi Kami, bit.ly/3nxF969 (diakses pada tanggal 8 Januari 2020).
- 86 Basis data Offshore Leaks oleh The International Consortium of Investigative Journalists, Montpelier International Group Limited, bit.ly/2MmfnoK (diakses pada tanggal 25 Januari 2021).



PT Industrial Forest Plantation
January 2021
© Aidenvironment

aidenvironment

Aidenvironment
Barentszplein 7
1013 NJ Amsterdam
The Netherlands
+ 31 (0)20 686 81 11

www.aidenvironment.org
info@aidenvironment.org